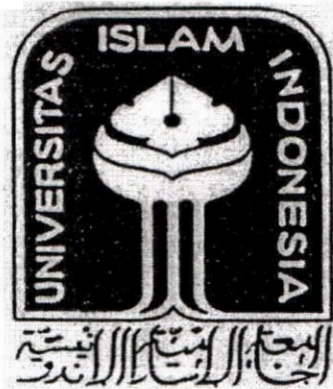


**IMPLEMENTASI MBS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(Studi Kasus di Madrasah Ibtida'iyah al-Huda Ploso Pacitan)**



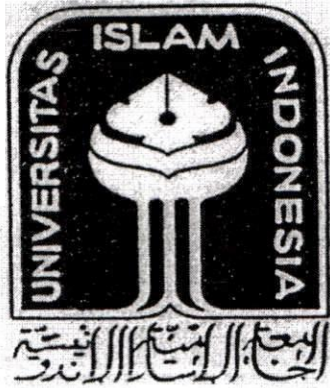
Oleh:
Damhudi
NIM: 08913158

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2011**

**IMPLEMENTASI MBS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(Studi Kasus di Madrasah Ibtida'iyah al-Huda Ploso Pacitan)**



Oleh:
Damhudi
NIM: 08913158

Pembimbing:
Dr. H. Imam Effendi, MA

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2011



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 329/PS-MSI/Peng./II/2011

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI MBS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Kasus di Madrasah Ibtida'iyah al-Huda Ploso Pacitan)**

Ditulis oleh : Damhudi

N. I. M. : 08913158

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam

Yogyakarta, 14 Maret 2011

Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Damhudi
Tempat/tgl lahir : Pacitan, 3 Pebruari 1970
N. I. M. : 08913158
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI MBS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (Studi
Kasus di Madrasah Ibtida'iyah al-Huda Ploso Pacitan)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Drs. H. A. F. Djunaidi, M.Ag

(.....)

Pembimbing : Dr. H. Imam Effendi, MA

(.....)

Penguji : Drs. H. Hajar Dewantara, M.Ag

(.....)

Penguji : Drs. Aden Wijdan SZ, M.Si.

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2011

Pukul : 11.30–12.30 WIB

Hasil / Nilai : **86,00 / A**

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 932/PS-MSI/ND/III/2011

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI MBS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Kasus di Madrasah Ibtida'iyah al-Huda Ploso Pacitan)**

Ditulis oleh : Damhudi

NIM : 08913158

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 4 Maret 2011

Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA



**MAGISTER STUDI ISLAM (S 2)
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Jl. Demangan Baru No. 24 Lt.II Telp./Fax (0274) 523637
YOGYAKARTA

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : IMPLEMENTASI MBS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN (Studi Kasus Di madrasah
Ibtida'iyah Al Huda Ploso Pacitan)

Ditulis oleh : Damhudi, SP.

NIM : 08913158

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 05 Februari 2011
Pembimbing,


Dr. H. Imam Effendi, MA

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ
وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ (رواه الطبراني)

“Barang siapa menghendaki (Kebahagiaan) di dunia maka untuk memperoleh harus dengan ilmu dan barang siapa menghendaki ((Kebahagiaan) di akhirat maka untuk memperolehnya harus dengan ilmu dan barang siapa menghendaki (Kebahagiaan) keduanya, maka untuk memperoleh harus dengan ilmu” (HR. At - Tabrani)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada :

”Pemilik Cinta Sejati, Penyejuk Nurani”

Ayahanda Bapak Kateno

Ibunda Laela

”Pembimbing Ketabahan, Kemandirian dan Harapan”

Bapak Mertua H. Parmin Suparyanto

Ibu Mertua Hj. Siti Rukayah

Untuk Istri

”Sumber Inspirasi Perjuangan Dan Harapan”

Sulistyani. SP

Anak - Anakku

”Dalam Pengabdian dan Proses Merenda Masa Depan”

Herlambang Eka Persada

Dani Alam Negara

ABSTRAK

Damhudi, SP. Implementasi Mbs Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Madrasah Ibtida'iyah Al Huda Ploso Pacitan)

MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

MBS merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Disamping itu, MBS juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah yang dilayani dengan tetap selaras pada kebijakan nasional pendidikan.²¹ Jadi, MBS merupakan sebuah strategi untuk memajukan pendidikan dengan mentransfer keputusan penting memberikan otoritas dari negara dan pemerintah daerah kepada individu pelaksana di sekolah.

MBS menyediakan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua kontrol yang sangat besar dalam proses pendidikan dengan memberi mereka tanggung jawab untuk memutuskan anggaran, personil, serta kurikulum.

MBS memiliki karakter yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya, karakteristik tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki sehingga membedakan dari sesuatu yang lain. MBS memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Adanya otonomi yang luas kepada sekolah
- b. Adanya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi
- c. Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional
- d. Adanya team work yang tinggi, dinamis dan profesional

Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dapat dilihat pula melalui pendidikan sistem. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan . Sebuah sistem sehingga penguraian karakteristik MPMBS berdasarkan pada input, proses dan output.

Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION MBS AND PUBLIC PARTICIPATION IN EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT EFFORTS (Case Study In Ibtida'iyah Madrasah Al Huda Ploso Pacitan)

By : Damhudi, SP.

MBS is one form of educational reform that offers to schools to provide better education and adequate to learners. Autonomy in management is a potential for schools to improve the performance of its staff, offering direct participation of relevant groups, and increasing public understanding of education.

MBS is an educational management model that gives greater autonomy to schools. In addition, MBS also encourage participatory decision-making that directly involves all residents served by the school remains aligned on national policy pendidikan. So, the MBS is a strategy to promote education by transferring significant decision to give the authority of state and local governments to individual implementers at the school.

MBS provides principals, teachers, students, and parents are very great control in the educational process by giving them the responsibility to decide the budget, personnel, and curriculum.

MBS has a character that needs to be understood by the school which will implement it, these characteristics are the hallmark owned so distinguish from something else. MBS has the following characteristics:

- a. The existence of a broad autonomy to schools
- b. Community participation and parents of high
- c. Democratic leadership and professional schools
- d. The existence of a high team work, dynamic and professional

Characteristics of School-Based Quality Improvement Management (MPMBS) can be seen also through the education system. This is based on the understanding that the school is. A system so that the decomposition of the characteristics MPMBS based on the input, process and output.

The essence of the school and community relations is to increase, awareness, ownership, and support from the community, especially the moral and financial support from the first has been decentralized. What is needed is an increase in intensity and extent.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | <i>b</i> | - |
| ت | Tā' | <i>t</i> | - |
| ث | Sā' | <i>s</i> | S (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | <i>j</i> | - |
| ح | Hā' | <i>h</i> | H (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | <i>kh</i> | - |
| د | Dāl | <i>d</i> | - |
| ذ | Zāl | <i>z</i> | /. (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | <i>r</i> | - |
| ز | Zā' | <i>z</i> | - |
| س | Sīn | <i>s</i> | - |
| ش | Syīn | <i>sy</i> | - |
| ص | Sād | <i>.s</i> | S (dengan titik di bawah) |
| ض | Dād | <i>.d</i> | D (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā | <i>t</i> | T (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā | <i>.z</i> | Z (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn | ' | koma terbalik ke atas |
| غ | Gāīn | <i>g</i> | - |
| ف | Fā | <i>f</i> | - |
| ق | Qāf | <i>q</i> | - |
| ك | Kāf | <i>k</i> | - |

| | | | |
|----|--------|----------|----------|
| ل | Lām | <i>l</i> | - |
| م | Mīm | <i>m</i> | - |
| ن | Nūn | <i>n</i> | - |
| و | Wāwū | <i>w</i> | - |
| هـ | Hā' | <i>h</i> | - |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Yā' | <i>y</i> | - |

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | Ditulis | Muta'addidah |
| عدة | Ditulis | 'iddah |

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|----------------|
| حكمة | Ditulis | <i>.hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| ----- | fathah | ditulis | a |
| ----- | kasrah | ditulis | i |
| ----- | ftmmnh | | n |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Fathah + alif جا هلية | ditulis ditulis | ā jāhiliyah |
| 2. | Fafhah + ya ' mati تنسى | ditulis ditulis | ā tansā |
| 3. | Kasrah + ya ' mati كريم | ditulis ditulis | ī karīm |
| 4. | dammah + wawu mati فروض | ditulis ditulis | ū furūd |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Fathah + ya ' mati بينكم | ditulis ditulis | ai bainakum |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | uu qaul |

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|----------------|
| أنتم | ditulis | a'antum |
| أعدت | ditulis | u'iddat |
| لئن شكرتم | ditulis | la'insyakartum |

VIII. Kata Sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | al-Qu' ān |
| أقياًس | ditulis | al-Qiy ās |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | ditulis | <i>as-Sam ā'</i> |
| السَّمْسُ | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------------|---------|------------------------|
| نَوَى الْفُرُوضِ | ditulis | <i>zawi al-fur ū d</i> |
| أَهْلُ السَّنَةِ | ditulis | <i>ahl as-Sunah</i> |



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dia telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya khususnya kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "*Implementasi Mbs Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Madrasah Ibtida'iyah Al Huda Ploso Pacitan)*"

Semoga sholawat dan salam dilimpahkan Allah kepada pemimpin umat, junjungan Nabi Besar Muhamad SAW, sahabat, kerabatnya sampai hari penghabisan.

Untuk menyusun sebuah tesis merupakan suatu hal yang sangat berat. Namun bagi yang berkemauan maju dituntut untuk mencari upaya yang dapat memecahkan kesulitan dan menghilangkan beban yang berat itu.

Namun tiada beban yang berat apabila diusahakan, tiada masalah yang sulit apabila dipecahkan, dan tiada jalan yang jauh apabila ditempuh. Penulis dituntut untuk mencoba. Dan dalam wujud yang sangat sederhana tapi dengan usaha penulis yang sudah maksimal, terwujudlah sebuah Tesis dengan judul di atas tersebut.

Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Pascasarjana (S2) Magister Studi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

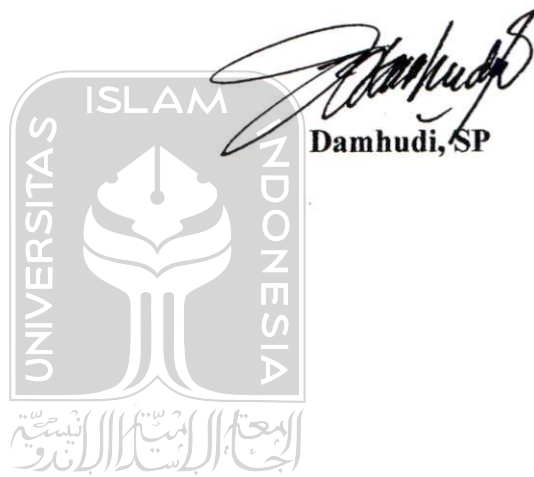
Dalam penyusunan Tesis ini penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu melalui pengantar ini penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr, Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, MHum, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta..
3. Yth. Bapak Dr. H. Imam Effendi MA, selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan sekaligus sebagai Pembimbing Tesis
4. Yth. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Yth. Para Dosen dan Karyawan UII Yogyakarta.
6. Ayah dan Ibunda serta Saudara yang telah memberikan do'a dan dorongannya.
7. Istriku tercinta Sulistyani, SP yang telah rela dan ikhlas dengan do'anya mengiringi kelancaran penyelesaian studi MSI UII Yogyakarta.
8. Anak-anakku tersayang Herlambang Eka Persada dan Dani Alam Negara yang telah menjadi Inspirasi dan motivator dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi penulis. Akhirnya untuk

membalas amal baik Bapak / Ibu serta semua pihak, penulis serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga menjadi amal sholeh yang diterima di sisi-Nya

Yogyakarta, 11 Januari 2011



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN | ii |
| TIM PENGUJI UJIAN TESIS | iii |
| NOTA DINAS | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | vii |
| ABTRACT | ix |
| PEDOMAN TRANS LITERANSI | x |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Pembatasan dan Perumusan Masalah | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR..... | 9 |
| A. Partisipasi Masyarakat Dalam konsep MBS..... | 9 |
| B. Konsep Partisipasi Terhadap Sekolah Berbasis Agama.. | 11 |
| C. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat..... | 13 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Strategi, Motivasi, dan Proses Membangun Partisipasi,,,,, | 16 |
| 2. Motivasi Partisipasi Masyarakat..... | 18 |
| 3. Proses Komite dan Sekolah Mendorong Partisipasi Masyarakat..... | 20 |
| D. Dinamika Partisipasi Masyarakat Terhadap Sekolah..... | 22 |
| 1. Latar Belakang Historis MBS..... | 25 |
| 2. Alasan Penerapan dan Dasar Kebijakan MBS... .. | 26 |
| 3. Dua Pilar MBS..... | 28 |
| 4. Konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) | 32 |
| E. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan..... | 52 |
| 1. Pengertian Mutu Pendidikan | 52 |
| 2. Indikator Mutu Pendidikan | 53 |
| 3. Langkah-langkah Peningkatan Mutu Pendidikan..... | 55 |
| F. Kerangka Berfikir..... | 62 |
| G. Hipotesis..... | 64 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 66 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 66 |
| B. Metode Penelitian..... | 66 |
| C. Populasi dan Sampel Penelitian..... | 66 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 67 |
| 1. Teknik Observasi..... | 67 |
| 2. Angket..... | 67 |
| E. Instrumen Pengumpulan Data..... | 67 |
| 1. Variabel Implementasi MBS (X)..... | 67 |
| 2. Variabel (Y) Peningkatan Mutu Peningkatan..... | 69 |
| F. Teknik pengolahan data dan analisa data..... | 72 |
| 1. Teknik pengolahan data..... | 72 |
| 2. Analisa data..... | 72 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 73 |
| A. Potret MI Al Huda..... | 73 |
| B. Deskripsi Data..... | 94 |

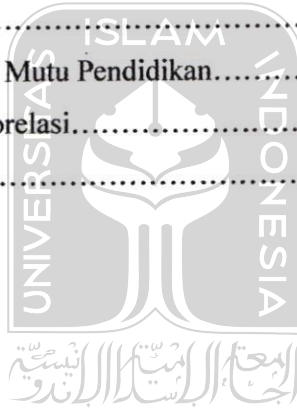
| | |
|---------------------------|-----|
| C. Analisa Data..... | 99 |
| BAB V PENUTUP..... | 109 |
| A. Kesimpulan..... | 109 |
| B. Saran..... | 110 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 109 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | 112 |



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| 1. Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Variabel X..... | 68 |
| 2. Tabel 3. 2 Kisi-kisi Instrumen Variabel Y..... | 71 |
| 3. Tabel 4.1 Distribusi Frekwensi Nilai Nyata dari Tiap Interval Mengenai Implementasi MBS..... | 96 |
| 4. Tabel 4.2. kategori Penilaian MBS..... | 97 |
| 5. Tabel 4.3. Distribusi Frekwensi Nilai Nyata dari Tiap Interval Mengenai mutu Pendidikan..... | 98 |
| 6. Tabel 4.4. Kategori Penilaian Mutu Pendidikan..... | 99 |
| 7. Tabel 4.5. Hasil Koefisien Korelasi..... | 100 |
| 8. Tabel 4. 6. Hasil Signifikansi..... | 101 |



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| 1. Gambar 1.1. Proses Motivasi..... | 21 |
| 2. Gambar 1.2. Hubungan antara motivasi dan prestasi sekolah..... | 22 |
| 3. Gambar 2.1. Penyempurnaan kualitas berkesinambungan dalam pendidikan..... | 61 |
| 4. Gambar 4.1. Perbedaan jumlah jenis kelamin..... | 95 |
| 5. Gambar 4.2. Tingkat kelulusan Guru MI Al Huda..... | 95 |
| 6. Gambar 4.3. Diagram Histogram Implementasi MBS(X)..... | 96 |
| 7. Gambar 4.3. Diagram Histogram Mutu Pendidikan..... | 98 |



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru, menunjukkan berakhir pula kebijakan pendidikan sentralistik, yaitu suatu kebijakan dimana pemerintah memiliki otoritas penuh di dalam pengelolaan pendidikan, mulai dari manajemen pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, hingga hal yang terkecil berupa penentuan seragam sekolah, yang kemudian diganti dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada era reformasi.

Reformasi merupakan era baru, era keterbukaan. Reformasi ditandai dengan dimulainya kehidupan demokrasi seluas-luasnya. Berbagai tuntutan yang dilakukan oleh segenap elemen masyarakat termasuk di dalamnya insan pendidikan terhadap pemerintahan baru, atas hak-hak otonomnya. Hari demi hari bergulir isu otonomi, akhirnya Presiden BJ. Habibie pada tanggal 7 Mei 1999 mengeluarkan UU No. 22/1999 tentang pemerintahan Otonomi Daerah.

Tujuan dilimpahkannya pelaksanaan pendidikan kepada pemerintah daerah seperti tercantum dalam konsideran UU No.22/1999, adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta mendayagunakan potensi dan keanekaragaman daerah dengan tanpa mengabaikan persaingan dunia global (*global village*)¹

¹ Fadjar, Malik , *Holistik Pemikiran Pendidikan*, Raja Grafindo Perkasa, (Jakarta, 2005) h.22.

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia.²

Namun saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap sekolah. Ada anggapan bahwa pendidikan tidak lagi mampu menciptakan mobilitas social mereka secara vertikal, karena sekolah tidak menjanjikan pekerjaan yang layak. Sekolah kurang menjamin masa depan anak

² Umaedi, *Manajemen mutu berbasis Sekolah / Madrasah (MMBS/M)*, CEQM, 2004 h. 1

yang lebih baik. Sebagaimana diungkapkan di muka, perubahan paradigma baru pendidikan kepada mutu (*quality oriented*) merupakan salah satu strategi untuk mencapai pembinaan keunggulan pribadi anak.³

Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20 M telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yang otomisasi dan demokratisasi. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah meletakkan sector pendidikan sebagai salah satu yang diotomisasikan bersama sektor-sektor pembangunan yang berbasis kedaerahan lainnya seperti kehutanan, pertanian, koperasi dan pariwisata.⁴

Otonomisasi sektor pendidikan kemudian didorong pada sekolah, agar kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Baik dan buruknya kualitas hasil belajar siswa menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah, karena pemerintah daerah hanya memfasilitasi berbagai aktivitas pendidikan, baik sarana prasarana, ketenagaan, maupun berbagai program pembelajaran yang direncanakan sekolah.⁵

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, sebagai pengganti undang-undang nomor 2 tahun 1989. Salah satu Isu penting dalam undang-undang tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan,

³ *Ibid*, hal. 245

⁴ Syafarudin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo 2002), hal. 19

⁵ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokatis*, (Jakarta: Kencana 2004), hal. 37

sebagaimana ditegaskan pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pernyataan pada pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Demokratisasi pendidikan merupakan implikasi dari dan sejalan dengan kebijakan mendorong pengelolaan sektor pendidikan pada daerah, yang implementasinya ditingkat sekolah, baik rencana pengembangan sarana, dan alat ketanagaan, kurikulum serta berbagai program pembinaan siswa, semua diserahkan pada sekolah untuk merancangny serta mendiskusikannya dengan mitra horizontalnya dari komite sekolah.⁶

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, MBS tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.⁷

⁶ Ibid, hal 265

⁷ E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah*, (Jakarta:Rosda 2004) cet ke 7 h.11

Ide meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sekolah merupakan kebijakan nasional pendidikan di Indonesia (Direktorat Pembinaan SMP, 2004). Kebijakan pembentukan Komite Sekolah di satuan pendidikan dan Dewan Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, merupakan wujud nyata upaya konkrit pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. KS/M dan DP diharapkan berfungsi sebagai wadah untuk menggalang peran serta masyarakat terhadap sekolah.

Kehadirannya diharapkan berfungsi secara optimal selaku badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator bagi upaya perbaikan dan kemajuan sekolah (Kemendiknas, No. 044/U/2003).

Dengan latar belakang tersebut jelas bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi peserta didik karena MBS memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, oleh karenanya penulis tertarik untuk mengetahui apakah penerapan konsep manajemen berbasis sekolah, Partisipasi masyarakat, dan orang tua berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan judul : **Implementasi MBS dan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Madrasah Ibtida'iyah Al Huda Ploso Pacitan)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dilakukan identifikasi masalah penelitian yang berkaitan dengan strategi peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan pendidikan
2. SDM Pendidikan
3. Sarana dan prasarana Pendidikan
4. Manajemen Pendidikan
5. Kurikulum Pendidikan
6. Lingkungan Pendidikan
7. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka masalah yang dibatasi pada strategi peningkatan mutu pendidikan diantaranya : Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Kurikulum serta partisipasi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah Implementasi MBS dan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan mutu pendidikan ?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian terhadap implementasi MBS dan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Mandrasah Ibtida'iyah Al Huda Ploso Pacitan ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis / akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai dampak implementasi MBS dan partisipasi masyarakat serta orang tua dengan mutu pendidikan yang akan dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kanech penelitian yang berbeda dan dengan sampel penelitian yang lebih banyak.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi MI Al Huda Ploso Pacitan untuk mengetahui peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi MBS dan Partisipasi Masyarakat serta Orang Tua.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan sekolah, masyarakat dan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- Mengetahui penerapan konsep MBS dan konsep partisipasi masyarakat serta orang tua yang dilakukan di MI Al Huda Ploso Pacitan

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan disini penulis akan mencoba membagi dari beberapa Bab diantaranya:

Bab I : Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang didalamnya berisi tentang :

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Bab Kedua merupakan Kajian Teori dan Kerangka berfikir terdiri dari:

Konsep MBS diantaranya: Pengertian MBS, Tujuan dan Manfaat MBS, Langkah-langkah yang harus dilakukan disekolah, Pengertian Mutu Pendidikan, Langkah-langkah Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kerangka berfikir.

Bab III : Bab Ketiga merupakan Metodologi Penelitian yang terdiri dari : Jenis Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Variabel dan Definisi Operasional, Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

Bab IV : Bab Keempat merupakan Hasil Penelitian terdiri dari : Gambaran Umum Obyek Penelitian, Deskripsi Analisis Data dan Penyajian Hasil Penelitian.

Bab V : Tesis ini ditutup dengan Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Partisipasi Masyarakat dalam Konsep MBS

Istilah MBS merupakan terjemahan dari “*school-based manajemen*”. Muncul pertama kali di Amerika tahun 1970-an sebagai alternatif untuk mereformasi pengelolaan pendidikan. Reformasi diperlukan karena kinerja sekolah selama puluhan tahun gagal menunjukkan peningkatan berarti, memenuhi tuntutan perubahan lingkungan sekolah. Tuntutan perubahan lingkungan sekolah antara lain: tuntutan dunia kerja, IPTEK, sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Lulusan sekolah pada saat itu di bawah standar tuntutan berbagai bidang kebutuhan yang mengakibatkan kekecewaan banyak kalangan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung⁸

Bahwa MBS terdiri atas tiga asal kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen berarti koordinasi dan penyerasian sumberdaya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis artinya “berdasarkan pada” atau “berfokus pada”. Dan sekolah merupakan organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional yang bertugas memberikan “bekal kemampuan dasar” kepada peserta didik atas dasar ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso, mikro) dan profesionalistik (kualifikasi untuk SDM). Kesimpulan, MBS adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan

⁸ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, Grasindo, Jakarta, 2003. h 24

secara otonomi oleh sekolah melalui sejumlah *input* manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (*partisipatif*). Kelompok kepentingan meliputi: kepala sekolah dan wakilnya, guru, siswa, konselor, tenaga administratif, orang tua siswa, tokoh masyarakat, para profesional, wakil pemerintah, dan wakil organisasi pendidikan.

MBS sebagai paradigma baru dalam mengelola pendidikan nasional, merupakan inovasi kebijakan pendidikan baru yang harus dikembangkan dalam rangka memecahkan kompleksitas persoalan pendidikan. Konsep MBS mengedepankan peningkatan mutu terpadu, sehingga dapat dijadikan kebijakan strategis dalam implementasi pendidikan yang diprakarsai sekolah dan daerah. Terwujudnya konsep ini apabila didukung oleh partisipasi penuh dari segenap masyarakat atau *stakeholdersnya*. Tanpa partisipasi, MBS seperti kehilangan ruh. Hal ini seperti apa yang dinyatakan oleh Suryadi, "MBS merupakan paradigma baru pengelolaan pendidikan yang bertujuan mengembalikan sekolah kepada pemilik atau *stakeholders* asli, yaitu masyarakat"⁹

MBS adalah pendekatan politik, bertujuan mendesain ulang, pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, KS/M, orang tua siswa, dan masyarakat. MBS mengubah sistem

⁹ Faisal, Sanapiah et.all., *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajaran dari Lapangan untuk Mewujudkan Visi Direktorat Pembinaan SMP*, UM Press, Malang, 2007.

pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal (*local stakeholder*).¹⁰

B. Konsep Partisipasi Terhadap Sekolah Berbasis Agama

Konsep partisipasi masyarakat terhadap sekolah berbasis agama, terutama madrasah, dilihat dari aspek *historis-filosofis*, justru mendapat tempat khusus bagi masyarakat Muslim, dari tahun ke tahun. Konsep partisipasi yang belakangan dikembangkan ini dianggap terlambat. Muhaimin, menyebutkan bahwa dalam realitas sejarah, madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat muslim itu sendiri. Sehingga madrasah sebenarnya sudah menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) dengan partisipasi masyarakat sebagai pilarnya. Indikatornya madrasah sampai saat ini masih tetap eksis, karena landasan filosofis berdirinya didorong oleh spirit agama dalam rangka pengembangan ajaran Islamiyah. Hingga saat ini kurang lebih 90% jumlah madrasah yang masih eksis di Indonesia adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta. Sedangkan sisanya bersatatus negeri.¹¹

Ada pun menurunnya minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam "madrasah" dewasa ini, lebih disebabkan oleh hegemoni politik kekuasaan. Baik hegemoni politik global, regional, nasional, maupun lokal. Hegemoni politik global dan regional dapat ditandai dengan pengambil alihan kekuasaan sebesar-besarnya oleh Barat, dan hegemoni nasional dan lokal dapat ditandai

¹⁰Fatah, Nanang, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

¹¹Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. h

dengan pelarangan aktivitas pendidikan Islam dari Hindia Belanda hingga Orde Baru yang ditandai dengan keluarnya Inpres SDN No.10/1973 tentang pengambilalihan "kepemilikan" sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah. Tantangan-tantangan yang besar ini lah, yang dihadapi madrasah dalam perjalanan sejarahnya.

Dampak Inpres membuat lembaga pendidikan Islam menjadi kurang percaya diri, karena dianggap sekolah nomor dua. Bersekolah di madrasah karena di sekolah negeri tidak diterima. Dan ini masih terasa hingga saat ini. Sehingga kedepan akan terjadi sebaliknya jika sekolah-sekolah Islam berbenah meningkatkan mutu layanan, mutu proses, dan mutu keluaran.

Berkaitan dengan partisipasi terhadap sekolah berbasis agama, berbagai temuan menunjukkan bahwa, masyarakat lebih tertarik berpartisipasi terhadap sekolah-sekolah berbasis agama dari pada sekolah yang bukan berbasis agama. Pada sekolah berbasis agama ini lebih mudah menggerakkan masyarakat untuk bergabung terhadap sekolah dari pada sekolah umum. Karena sekolah berbasis agama sudah memiliki potensi-potensi besar untuk mendorong masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah. Misalnya tokoh-tokoh agama dan ajaran-ajaran agama yang dianut masyarakat itu sendiri.

Anggapan masyarakat umum ini, bahwa masyarakat mau berpartisipasi terhadap sekolah asal untuk kepentingan agama. Masyarakat lebih tertarik membesarkan SMP Assasun Najah berbasis agama dari pada SMP Negeri 7. Pada SMP Assasun Najah ini tidak memungut biaya pendidikan (pendidikan gratis), dan untuk biayanya bersumber pada amal masyarakat dipungut melalui malam

dana (saprah amal) yang diselenggarakan oleh pengelola pondok. Kasus ini juga sama dialami di Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, seperti dilaporkan oleh Sanapiah Faisal, Hasil temuan menunjukkan bahwa, sekolah umum hampir seluruhnya berbasis negara. Sangat kecil sekolah umum berbasis masyarakat. Sebaliknya, sekolah-sekolah keagamaan hampir seluruhnya berbasis masyarakat, dan kecil sekali berbasis negara ¹².

C. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk konkrit partisipasi masyarakat sebagaimana amanah UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20/2003 adalah di salurkan melalui dua lembaga formal yang dibentuk pemerintah sesuai dengan semangat MBS yaitu Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dua lembaga inilah sebagai pilar penopang MBS. Namun apakah dua lembaga ini mampu mendorong masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif terhadap sekolah, atautkah justru sebaliknya, sebagaimana temuan-temuan terdahulu menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menghendaki pembubaran Komite Sekolah. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, dibutuhkan pikiran-pikiran kreatif dan strategi-strategi yang tepat oleh Komite Sekolah dan madrasah untuk memberikan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat luas agar dapat berpartisipasi aktif terhadap sekolah. Sesuai dengan amanah UU ada empat bentuk partisipasi masyarakat yang tergabung dalam DP dan KS/M, yaitu (1) partisipasi dalam memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) partisipasi dalam bentuk memberikan dukungan

¹². (Faisal *et.all.*, 2007: P.76)

(*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) partisipasi dalam bentuk memberikan pengontrolan (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan haluan pendidikan di satuan pendidikan; dan (4) mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.¹³

Dalam penerapannya, setiap sekolah menggunakan strategi masing-masing untuk mendapatkan partisipasi masyarakat. Temuan ICW misalnya, menunjukkan bahwa ada sekolah yang tinggal mengganti nama Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) menjadi Komite Sekolah. Sehingga bentuk partisipasinya hanya sebatas orang tua siswa menyekolahkan anaknya dan BP3 menarik iuran dari orang tua siswa. Tapi ada juga sekolah yang profesional melakukan terobosan-terobosan cemerlang untuk mendapat partisipasi masyarakat tidak hanya membentuk KS/M, tapi juga tetap mempertahankan BP3 dalam bentuk POS (Paguyuban Orang Tua Siswa) dan fungsi Hubungan Masyarakat (HUMAS) seperti di MIN Malang I. Upaya ini dilakukan sebagai ikhtiar untuk mendapatkan partisipasi yang lebih besar terutama dalam bentuk dana dan pemikiran. Sementara pada SMPK Santa Maria Malang II, misalnya dengan strategi membentuk Paguyuban Peduli Pendidikan Panderman (P-4) yang selama ini difungsikan sebagai Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan. Lembaga ini berperan besar menggalang dana partisipasi sekolah. Sekolah pun memiliki ketergantungan terhadapnya.¹⁴

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Dirjen Dikdasmen, (Jakarta, 2002) h 33.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Profil Pendidikan Kota Malang 2007/2008*.

Sementara itu, temuan Faisal *et.all.*, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap sekolah umumnya diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu: bentuk dana, fasilitas, dan pemikiran/moral. Dari ketiga wujud bentuk partisipasi masyarakat ini, yang paling menonjol adalah partisipasi dalam bentuk dana, kemudian diikuti dengan pemikiran/moral, dan fasilitas. Kelompok partisipasi terbesar terhadap sekolah adalah orang tua murid, diikuti alumni, dan kalangan masyarakat lainnya baik kelompok maupun individu. Anggota Komite Sekolah yang ada di tingkat satuan pendidikan sebagian besar terdiri dari orang tua siswa dan alumni sekolah yang bersangkutan.

Bentuk partisipasi masyarakat terhadap sekolah lebih berwujud dana karena penggerakkan atau dorongan partisipasi, terutama yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, lebih diarahkan untuk menghimpun dana bagi kepentingan pengembangan sekolah. Sementara penggerakkan partisipasi untuk menjangkau pemikiran, dukungan fasilitas, dan lain-lain tidak banyak dilakukan. Hal ini menurut hasil temuan Faisal *et.all.*, menunjukkan bahwa pihak sekolah merasa memiliki kemampuan yang lebih atau sudah punya *stock of knowledge* yang cukup dalam urusan manajemen sekolah serta proses belajar mengajar. Bahkan dalam urusan pengembangan organisasi pun, sekolah cenderung merasa lebih tahu sehingga tidak terlalu membutuhkan pikiran dari luar sekolah, seperti dari Komite Sekolah. Dalam praktek, yang lebih dibutuhkan sekolah dari masyarakat adalah dukungan dana. Karena itu partisipasi masyarakat lebih diarahkan dalam bentuk dana.

Tidak berlebihan jika ada yang mengatakan, bahwa bentuk partisipasi melalui komite ini, tampaknya belum berjalan secara efektif dan efisien. Bahkan lembaga ini, pada sekolah tertentu justru menimbulkan masalah baru. Temuan ICW dan Tim peneliti Faisal menunjukkan bahwa sekolah tertentu yang hanya mengharap lembaga partisipasi melalui KS/M terdapat hubungan yang tidak harmonis antara kepala sekolah dengan KS/M. Persoalan-persoalan yang paling sering muncul hingga menimbulkan konflik internal antara komite dengan sekolah biasanya pada anggaran pendidikannya. Hal ini terjadi pada SMP Negeri 5 Malang, ada seorang guru menyampaikan bahwa, yang paling sering menimbulkan konflik antara komite dengan pihak sekolah adalah pada proyek pembangunan gedung sekolah. Komite kadang-kadang berlebihan, karena merasa memiliki wewenang dan posisi yang kuat.

Persoalan seperti ini tidak dialami oleh semua sekolah. Terutama pada sekolah-sekolah berbasis agama. Mereka menyatakan diri untuk bergabung berpartisipasi terhadap sekolah biasanya ditandai dengan sikap pengabdian. Dan mereka biasanya lebih banyak memberi dari pada menerima. Orang-orang yang bergabung biasanya sudah mapan secara ekonomi.

1. Strategi, Motivasi, dan Proses Membangun Partisipasi

Untuk mendorong dan menyadarkan masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Akan tetapi akan menyita banyak pikiran, banyak tenaga, dan banyak materi. Karena yang digerakkan adalah masyarakat, sementara masyarakat adalah manusia, dan manusia adalah makhluk individu. Setiap individu memiliki karakteristik sifat yang unik, khas, dinamis

(berubah-ubah), dan berbeda-beda. Maka hal yang terpenting adalah bagaimana mencari formulasi yang tepat, dengan berbagai upaya, strategi, dan langkah-langkah konkrit yang dapat menyentuh hati para partisipan agar mau bergabung dengan lembaga partisipasi masyarakat yang dibentuk. Diantara bentuk-bentuk strategi untuk mendorong dan menyadarkan masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah adalah pendekatan ideologis, pendekatan motivasi, dan pendekatan sosial keagamaan. Tiga bentuk strategi gerakan ini lah, barangkali akan memberikan terapi yang tepat untuk mendapatkan partisipasi permanen atau rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap sekolah dapat terwujud sesuai impian.

Tanpa strategi dan langkah-langkah tersebut, konsep partisipasi terhadap sekolah khususnya di Indonesia akan mengalami kebuntuan. Untuk itu, aspek yang terpenting yang harus diketahui pihak sekolah dan komite adalah aspek kultur dan apa yang menjadi motivasi masyarakat sekitarnya. Setiap aktifitas apapun yang dilakukan manusia sangat tergantung pada aspek motivasinya. Aspek motivasi ini dalam pandangan Islam dikenal dengan istilah "niat". Sebagaimana dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa "*innamal 'amālū binniyat*" (tiap aktifitas tergantung pada niatnya)." Artinya, Islam melihat etos dan motivasi partisipasi masyarakat setiap umatnya cukup dilihat pada bagaimana niat atau motivasi seseorang. Jika niat atau motivasi masyarakat berpartisipasi itu ibadah, maka masyarakat secara sukarela dengan penuh keikhlasan berbondong-bondong berpartisipasi terhadap sekolah. Dengan demikian, sekolah dan komite akan mudah mendapatkan partisipasi masyarakat luas.

Bahwa keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang datang dari dalam maupun dari luar. Dari berbagai faktor tersebut, menurut Mulyasa motivasi merupakan suatu faktor yang cukup dominan dan dapat menggerakkan faktor-faktor lain kearah efektivitas kerja. Dalam konteks tertentu motivasi sering disamakan dengan mesin dan kemudi mobil, yang berfungsi sebagai penggerak dan pengarah. Dari sini dapat dikatakan bahwa, tiga strategi ini, strategi pendekatan ideologis, strategi pendekatan motivasi, dan pendekatan sosial keagamaan memiliki peran strategis dan sangat menentukan untuk mendorong dan membangun kesadaran masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang efektif, baik dari kepala sekolah sebagai pionernya, maupun dari Komite Sekolah sebagai mitra sekolah. Karena hanya dengan kepemimpinan yang efektif, yang mampu menggerakkan suatu roda organisasi menjadi organisasi modern. Dan masyarakat modern-rasional, hanya mau bergabung dengan komunitas modern yang terbuka dan dinamis.¹⁵

2. Motivasi Partisipasi Masyarakat

Di sini perlu pembahasan khusus mengenai motivasi, mengingat salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan teori motivasi. Istilah motivasi sering digunakan secara bergantian dengan istilah kebutuhan (*need*), keinginan (*want*), dorongan (*drive*), dan gerak hati (*impuls*).

¹⁵Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, PT. Remaja Rosda Karya, Cetakan ke Sepuluh, Bandung, 2006.

Istilah tersebut merupakan motif, sedangkan motivasi adalah kekuatan yang mendorong seorang untuk melakukan suatu kegiatan. Motif menurutnya masih bersifat potensial, dan aktualisasinya dinamakan motivasi, serta pada umumnya diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Dengan demikian, motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, atau dorongan.

Bahwa motivasi adalah unsur penentu yang mempengaruhi perilaku yang terdapat dalam setiap individu. Motivasi adalah daya penggerak aktif, yang terjadi pada saat tertentu, terutama jika kebutuhan untuk mencapai tujuan sempat dirasakan atau mendesak.

"Motif" adalah sesuatu yang memulai gerakan. Sedangkan motivasi adalah sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu. Memotivasi orang adalah menunjukkan arah tertentu kepada mereka dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa mereka sampai kesana. Bermotivasi adalah ingin pergi kesuatu tempat berdasarkan keinginan sendiri, atau terdorong oleh apa saja yang ada agar dapat pergi dengan sengaja dan untuk mencapai keberhasilan setelah tiba di sana." Armstrong kemudian membagi motivasi menjadi dua bagian yaitu: (a) motivasi buatan (*extrinsic*): apa yang Anda lakukan terhadap orang untuk memotivasi mereka; dan (b) motivasi hakiki (*intrinsic*): faktor-faktor dari dalam diri sendiri yang mempengaruhi orang untuk berperilaku atau untuk bergerak kearah tertentu.

Dengan demikian motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Memberikan motivasi adalah memastikan

bahwa orang bergerak ke arah yang kita inginkan agar mereka kerjakan dan apa yang ingin mereka kerjakan tidaklah perlu bersamaan. Sasaran motivasi adalah untuk mencapai rasa memiliki tujuan bersama dengan memastikan bahwa sejauh mungkin keinginan dan kebutuhan organisasi serta keinginan dan kebutuhan para anggotanya berada dalam keadaan yang harmonis.

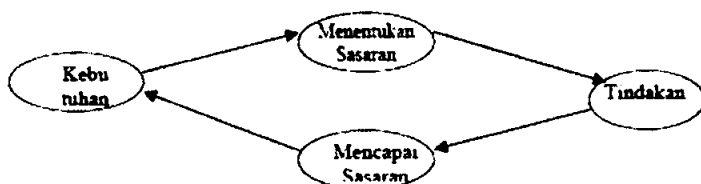
3. Proses Komite dan Sekolah Mendorong Partisipasi Masyarakat

Untuk mendorong masyarakat agar secara sadar berpartisipasi terhadap sekolah, bukanlah pekerjaan mudah. Tapi membutuhkan pikiran, tenaga, dan waktu atau proses yang panjang. Masyarakat tidak serta merta mendukung program partisipasi terhadap sekolah, sebelum mereka memahami dan menyadari apa itu partisipasi. Setelah masyarakat menyadari dan memahami, tentang pentingnya peran mereka terhadap sekolah, belum tentu juga, mereka akan serta merta langsung bergabung dengan sekolah untuk berpartisipasi. Tapi ada tahapan-tahapan lain yang menentukan mereka bergabung atau tidak dengan sekolah.

Tahapan-tahapan lain yang dimaksud adalah seberapa besar manfaat yang diberikan pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika menguntungkan kepentingan mereka, maka mereka akan bergabung dengan sekolah, jika tidak memberikan manfaat, maka mereka akan mencari sekolah lain yang akan menjanjikan harapan mereka. Proses ini oleh Amrstrong (1988: P.70) disebut proses motivasi. Proses motivasi dimulai oleh seseorang yang mengenali secara sadar atau tidak suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi.¹⁶

¹⁶Armstrong, Michel, *Seri Pedoman Manajemen: Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alih Bahasa: Cikmat et.al., PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1990.

Proses ini menurut Amrstrong dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Proses Motivasi

Proses motivasi dipengaruhi oleh dua hal yaitu: (a) pengalaman. Orang belajar dari pengalaman masa lalu. Ketika pengalaman di dalam mengambil tindakan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka masyarakat memandang bahwa tindakan tersebut membantu mencapai sasaran mereka. Jika, pengalaman masyarakat sebelumnya kurang begitu berhasil, maka masyarakat kemudian enggan berpartisipasi terhadap sekolah tersebut; dan (b) harapan. Kekuatan harapan sesungguhnya mungkin didasarkan kepada pengalaman masa yang lalu.

Masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah, tetapi mereka menaruh harapan yang besar terhadap sekolah tersebut. Jika, harapannya terpenuhi, maka partisipasi masyarakat pun meningkat, jika tidak, maka masyarakat kemudian hilang kepercayaan terhadap sekolah tersebut, bahkan menarik dukungannya terhadap sekolah tersebut dan mencari sekolah yang lain sesuai harapannya. Jika, pihak komite dan sekolah ingin mendapatkan partisipasi masyarakat luas yang sebesar-besarnya, maka aspek yang terpenting adalah bagaimana komite dan sekolah harus memahami apa yang menjadi motivasi masyarakat dalam mencapai kebutuhannya. Karena tanpa memahami apa yang menjadi motivasi masyarakat yang diajak untuk bergabung dengan sekolah tersebut, maka masyarakatpun sulit untuk bergabung dengan sekolah tersebut.

Untuk itu, sekolah perlu meningkatkan prestasi-prestasi atau mutu sekolah yang sedang menjadi trend di masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas sekolah dan berbagai prestasi yang dicapai, maka komite dan sekolah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan partisipasi masyarakat. Karena menurut Armstrong, hubungan antara motivasi dan prestasi adalah sesuatu yang positif. Dalam pengertian bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap sekolah akan menghasilkan lebih banyak usaha dan prestasi sekolah yang lebih baik. Bentuk hubungannya adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.2 Hubungan Antara Motivasi dan Prestasi Sekolah

D. Dinamika Partisipasi Masyarakat Terhadap Sekolah

Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2000, menetapkan MBS sebagai kebijakan Nasional, dan pada tahun 2001 pemerintah baru mulai mensosialisasikan ke daerah dengan prioritas basis untuk membentuk DP dan KS/M, masing-masing di Propinsi Sumatera Barat, Bali dan Jawa Timur, masing-masing satu per Kabupaten/Kota. Tahap ini ada daerah Kabupaten/Kota yang telah membentuk DP dan KS/M atas inisiatif sendiri¹⁷

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Dirjen Dikdasmen, Jakarta, 2002. h 21

Salah satunya adalah kota Malang. Masyarakat sangat antusias menerima kehadiran KS/M sebagai mitra sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun dalam penerapannya, terdapat ketimpangan-ketimpangan kebijakan. Temuan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), menunjukkan bahwa: (a) kepala sekolah masih memonopoli kebijakan. Kepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah, secara fungsional mesti bertindak sebagai manajer dan pemimpin yang efektif. Sebagai manajer ia harus mampu mengatur supaya semua potensi sekolah dapat berfungsi optimal. Artinya kepala sekolah mesti bisa melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan.

Sebagai seorang manajer semua kegiatan memang harus di bawah pengawasannya, namun tidak berarti memonopoli kekuasaan. Dalam menjalankan fungsi manajemen, kepala sekolah mesti melibatkan seluruh elemen yang ada dalam sistem, seperti guru, siswa, orang tua siswa, dan KS/M secara yuridis formal telah dikukuhkan melalui UU Sisdiknas dan Kepmendiknas No.044/U/2002, kepala sekolah memiliki *partner* yaitu KS/M. (b) KS/M tidak mampu menjalankan fungsinya. Padahal dalam kepmendiknas No.044/U/2002 ditegaskan bahwa KS/M adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan. Sebagai badan independen KS/M memiliki empat peran yaitu pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator. Dengan empat peran ini, KS/M sebagai lembaga yang super. Akan tetapi temuan ICW

menunjukkan umumnya kemunculan KS/M berasal dari inisiatif kepala sekolah karena adanya tekanan dari pemerintah. Sehingga untuk membentuk KS/M, kepala sekolah mengambil jalan pintas dengan mengubah nama lembaga yang sudah ada seperti BP3 atau dengan menunjuk beberapa orang langsung menjadi pengurus KS/M. Pada akhirnya KS/M tidak lebih kepanjangan tangan dan posisinya sub ordinat kepala sekolah. Di empat sekolah menjadi contoh KS/M dibentuk kepala sekolah, dan di SMP 70 Jakarta kepala sekolah memveto KS/M pilihan dewan guru dengan alasan tidak ada kewajiban bagi kepala sekolah untuk menjalankan hasil keputusan rapat dewan guru¹⁸

Implikasinya, temuan menunjukkan terjadi korupsi dana APBS, dan diluar APBS (*non-budgeter*), membuat anggaran ganda, alokasi dana yang tidak jelas, anggaran yang tidak ada realisasinya, dan lainnya; (c) pelaksanaan konsep MBS masih bersifat *top down* atau *sentralistik*. (d) KS/M hanya sebagai alat kepala sekolah; (e) pelaksanaan MBS terdorong proyek bukan substansi MBS.

Temuan Faisal *et.all.* (2005) menunjukkan: (a) KS/M di seluruh satuan pendidikan dan daerah belum berfungsi sesuai harapan, tetapi keberadaannya menunjukkan kecenderungan yang baik dan cukup menjanjikan sebagai saluran sekaligus kekuatan pendorong partisipasi masyarakat terhadap sekolah; (b) ada isyarat bahwa ide-ide dasar partisipasi terhadap sekolah belum dipahami dengan baik dan utuh baik oleh pejabat-pejabat Pemerintah Daerah maupun oleh anggota DP, pengurus KS/M, dan juga kepala sekolah KS/M pada sekolah negeri

¹⁸ *Ibit* Irawan, 2004: h.115.

lebih aktif dan berfungsi relatif baik, sementara pada sekolah-sekolah swasta masih berhadapan dengan masalah internal sekolah dan belum berbagi peran dengan yayasan pemilik sekolah. Meskipun sebagian kasus KS/M di sekolah-sekolah swasta dapat menjalankan fungsi dan memainkan peran dengan cukup baik¹⁹

1. Latar Belakang Historis MBS

Meskipun Departemen Pendidikan Nasional menganggap MBS merupakan model baru dalam kebijakan pendidikan nasional, akan tetapi banyak kalangan menilai bahwa kebijakan tersebut sudah pernah diterapkan pada era pemerintahan Sukarno. “M. Surya ketua PGRI, yang diwawancarai tim peneliti ICW, menilai bahwa jauh sebelum konsep ini dibicarakan, Indonesia sebenarnya sudah sempat menerapkannya sekitar tahun 1950-an. Namanya memang bukan MBS, tetapi esensi yang dibawah sama.

Bahwa Indonesia sejak lama telah menjalankan MBS. Walaupun kemudian terpotong ketika Suharto memimpin. Pada awal 1960-an, yang mendirikan dan mengelola sekolah adalah masyarakat, kemudian diubah menjadi alat untuk mereproduksi nilai-nilai rezim Orde Baru melalui kebijakan-kebijakannya. Digulirkannya SD Inpres oleh pemerintah Orde Baru pada 1970-an, menandai kembalinya peran negara dalam pendidikan. Bahkan negara berperan pada hal-hal terkecil dalam sekolah, seperti penentuan seragam. Keadaan inilah kemudian terkuburnya MBS versi lama.

¹⁹ Faisal *et.all.*, 2007: hal.348.

Pemerintah memang sengaja menghancurkan sekolah-sekolah yang dibangun masyarakat. Dibuat dan diciptakan *image*, sekolah negeri dibuat negara jauh lebih baik dibanding sekolah swasta. Pada hal menurut Tilaar, dulu sekolah swasta yang dikelola masyarakat berkembang sangat pesat.²⁰

Tilaar memberi contoh pesantren. Pesantren adalah suatu sistem kehidupan yang lahir dan dibesarkan dalam suatu masyarakat demokratis. Terlepas dari pro dan kontra soal keberadaan MBS di Indonesia, yang jelas legal formal MBS baru diterapkan pasca reformasi. Dampak reformasi mendorong otonomi terhadap segala aspek kehidupan.

Salah satu dampak yang dirasakan secara langsung bagi dunia pendidikan adalah otonomi sekolah yang dituangkan dalam konsep MBS. MBS ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2000. Keputusan ini kemudian diikuti oleh sekolah di semua level SD/MI hingga SMA/MA.

2. Alasan Penerapan dan Dasar Kebijakan MBS

Departemen Pendidikan Nasional memberikan sepuluh alasan penerapan MBS, yaitu:

1. Dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih aktif atau kreatif meningkatkan mutu sekolah;
2. Dengan pemberian fleksibilitas atau keluwesan-keluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya,

²⁰ Irawan, Ade, et.all., *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta*, Cetakan Pertama, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2004.

- sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah;
3. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga ia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber dayanya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya;
 4. Sekolah lebih mengetahui lembaganya, khususnya *in put* pendidikan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik;
 5. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa yang terbaik bagi dirinya;
 6. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat;
 7. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat;
 8. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan kepada masing-masing pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan;

9. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya inovasi dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan Pemerintah Daerah setempat;
10. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Kebijakan MBS ditandai dengan UU No.22/1999 tentang pemerintahan otonomi daerah. Kemudian UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan PP No.25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. Dan pemerintah memperkuat pelaksanaan MBS melalui UU RI No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Dua Pilar MBS

MBS merupakan paradigma baru manajemen pengelolaan pendidikan di era reformasi. Eksistensinya hanya mampu bertahan pada sistem pemerintahan yang demokratis. Begitu juga di sekolah, MBS dapat berjalan efektif dan efisien bila kepala sekolahnya memiliki model kepemimpinan demokratis. Jika tidak maka di sana terdapat kepincangan-kepincangan dalam pengelolaan dan pengendalian mutu pendidikan. Karena konsep MBS menghendaki sistem pengelolaan pendidikan yang demokratis, transparansi, dan akuntabilitas. Agar partisipasi masyarakat berjalan efektif, efisien, dan optimal dengan prinsip demokratis, transparansi, dan akuntabilitas, maka pemerintah membentuk

wadah partisipasi masyarakat sebagai pilar penegak MBS yakni, DP dan KS/M. Kedua lembaga ini dibentuk sebagai wadah menampung dan menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam panduan umum DP dan KS/M bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah DP di tingkat kabupaten/kota dan KS/M ada pada tingkat satuan pendidikan²¹

a. Dewan Pendidikan (DP)

Dewan Pendidikan merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Namanya bersifat generik, karena bisa diganti dengan nama lain yang sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Lembaga ini bersifat otonom dan tidak mempunyai hubungan hierarkhis dengan dinas pendidikan kabupaten/kota maupun lembaga pemerintah lainnya.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui DP. (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) menciptakan suasana dan kondisi

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, (Jakarta, 2002).

transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. DP juga berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*); pendukung (*supporting agency*); pengontrol (*controlling agency*); mediator antara pemerintah dengan masyarakat disatuan pendidikan.

DP juga menjalankan beberapa fungsi: (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) melakukan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: (a) kebijakan dan program pendidikan; (b) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; (c) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor kepala satuan pendidikan; (d) kriteria fasilitas satuan pendidikan; dan (e) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (5) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan; dan (6) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

b. Komite Sekolah/Madrasah (KS/M)

KS/M adalah nama atau badan yang berkedudukan di sekolah, baik pada jalur sekolah maupun jalur luar sekolah atau beberapa sekolah yang sama di suatu kompleks yang sama. Nama KS/M merupakan nama generik. Artinya, nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah, seperti

Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Luar Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.

Dalam Panduan DP dan KS/M, KS/M merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politik, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan²²

KS/M Sebagai Unsur Sistem MBS

KS/M merupakan sebuah lembaga otonom yang mewadahi partisipasi masyarakat yang dibentuk pemerintah dengan tujuan umumnya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara MBS juga merupakan sebuah instrumen kebijakan pemerintah yang memberi otonomi yang luas kepada satuan pendidikan untuk mengelola sekolahnya dalam rangka mencapai mutu pendidikan nasional. Konsep implementasi MBS menuntut adanya bentuk partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan proses pendidikan. Sementara bentuk partisipasi masyarakat terhadap sekolah diwujudkan berupa KS/M. Sehingga KS/M dianggap sebagai ruh atau sub sistem dari MBS. Sebagai sebuah lembaga modern tentunya KS/M memiliki suatu sistem kelembagaan tersendiri untuk menjalankan peran, fungsi dan tugas pokoknya.

Fungsi sistem kelembagaan inilah yang kemudian akan mengelola, mengatur, membina dan membangun lembaga KS/M. Lembaga ini dalam implementasinya merupakan bagian dari pelaksanaan MBS itu sendiri. Karena

²²Depdiknas, *MPMBS, Konsep & Pelaksanaan*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen 2001.

lembaga ini secara khusus dibentuk sebagai wadah berkumpulnya masyarakat luas berpartisipasi terhadap sekolah. Sementara implementasi MBS juga membutuhkan partisipasi masyarakat luas. Karena KS/M merupakan bagian atau sub sistem dari MBS, maka untuk mengukur keberhasilan/kesuksesan kinerja lembaga KS/M kita dapat melihat pada unsur-unsur pembentuk sistem itu berjalan secara efektif dan efisien atau tidak. Dalam KS/M adalah UU, PP, Kepmendiknas, keputusan KS/M dan keputusan kepala madrasah.

Dasar Hukum Keberadaan Komite Sekolah/Madrasah (KS/M)

Dasar pegangan, pelaksanaan, dan pembentukan KS/M adalah: pertama, UU RI No.25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000- 2004. Pada Bab VII tentang pembangunan sub bab C. Program Pembangunan point 1 mengenai sasaran ketiga pembangunan adalah “Terwujudnya pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan dewan sekolah di tiap-tiap Kabupaten/Kota serta pemberdayaan atau pembentukan KS/M di seluruh SD/MI, SMP/MTs, dan SMU/MA” kedua, UU RI No.20/2003 tentang Sisdiknas; ketiga, SK Menteri Pendidikan Nasional, No.044/U/2002 tentang DP dan KS/M; dan kelima, Surat edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI melalui SK No.E/101/2001, menginstruksikan didirikannya Majelis Madrasah untuk MI, MTs dan MA.

4. Konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)

a. Pengertian Manajemen berbasis Sekolah MBS

Istilah Manajemen berbasis Sekolah merupakan terjemahan dari *School Based Management*. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat.²³

MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.²⁴

MBS merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Manajemen berbasis Sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal *Local Stakeholder*.

MBS merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Disamping itu, MBS juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah yang dilayani dengan tetap selaras pada kebijakan nasional pendidikan.²⁵

²³ Ibtisam Abu Duhou, *School Based Management*, (Jakarta:Kencana 2004) h.7

²⁴ E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah*, (Jakarta:Rosda 2004), cet ke.7, h.24

²⁵ Bedjo Sujanto, *Mensiasati Manajemen berbasis Sekolah di Era Krisis yang berkepanjangan*. (Jakarta:ICW 2004) h.25

MBS menyediakan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua kontrol yang sangat besar dalam proses pendidikan dengan memberi mereka tanggung jawab untuk memutuskan anggaran, personil, serta kurikulum.²⁶

b. Karakteristik MBS

MBS memiliki karakter yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya, karakteristik tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki sehingga membedakan dari sesuatu yang lain. MBS memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Adanya otonomi yang luas kepada sekolah
- b. Adanya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi
- c. Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional
- d. Adanya team work yang tinggi, dinamis dan profesional²⁷

Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dapat dilihat pula melalui pendidikan sistem. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan . Sebuah sistem sehingga penguraian karakteristik MPMBS berdasarkan pada input, proses dan output.²⁸

1. Input Pendidikan

Dalam input pendidikan ini meliputi; (a) memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, (b) sumber daya yang tersedia dan siap, (c) staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, (d) memiliki harapan prestasi yang tinggi, (e) fokus pada pelanggan.

²⁶ Nanang Fatah, *Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah* . (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2003) h.8

²⁷ Ade Irawan dkk, *mendagangkan Sekolah (studi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah)*. (Jakarta: ICW 2004) h.14

²⁸ Udin Syarifudin sa.ud , *implementasi school based management, sebagai strategi pengembangan otonomi sekolah*, 2001

2. Proses

Dalam proses terdapat sejumlah karakter yaitu; (a) PBM yang memiliki tingkat efektifitas yang tinggi, (b) Kepemimpinan sekolah yang kuat, (c) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (d) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, (e) Sekolah memiliki budaya mutu, (f) Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis.

3. Output yang diharapkan

Output Sekolah adalah Prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya output dapat di klasifikasikan menjadi dua yaitu output berupa prestasi akademik yang berupa NEM, lomba karya ilmiah remaja, cara-cara berfikir (Kritis, Kreatif, Nalar, Rasionalog, Induktif, Deduktif dan Ilmiah). Dan output non akademik, berupa keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerjasama yang baik, toleransi, kedisiplinan, prestasi olahraga, kesenian dari para peserta didik dan sebagainya.²⁹

Karakteristik MBS bisa diketahui juga antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya administrasi.

Sementara itu, menurut Depdiknas fungsi yang dapat didesentralisasikan ke sekolah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan evaluasi program sekolah

²⁹Depdiknas, *MPMBS, konsep & Pelaksanaan* (Jakarta: depdiknas dirjen diknasmen direktorat SLTP, 2001), h.9

Sekolah di beri kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya, Sekolah juga diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri.

2. Pengelolaan Kurikulum

Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Sekolah juga di beri kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

3. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar

Sekolah di beri kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran dan pengajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah.

4. Pengelolaan ketenagaan

Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sanksi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

5. Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus di beri kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan

penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata bergantung pada pemerintah.

6. Pelayanan siswa

Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumni dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

7. Hubungan sekolah dan masyarakat

Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.³⁰

c. Tujuan Manajemen berbasis Sekolah (MBS)

MBS ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengolah sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan

³⁰Nurkholis, *Manajemen berbasis Sekolah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rosda 2004) h. 28

profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif serta disinsentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerataan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah³¹

MBS adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, KS/M, orang tua siswa, dan masyarakat. MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal (*local stakeholder*).

Setidaknya terdapat beberapa manfaat MBS, diantaranya adalah: (1) memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada sekolah disertai seperangkat tanggung jawab; (2) dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi MBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas; (3) keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah; (4) dengan diberikannya kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi dengan melakukan

³¹Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, PT. Remaja Rosda Karya, Cetakan ke Sepuluh, (Bandung, 200.h, .25.

eksperimentasi-eksperimentasi dilingkungan sekolahnya, dengan demikian mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah; (5) melalui penyusunan-penyusunan kurikulum selektif, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua, misalnya orang tua dapat mengawasi langsung proses belajar anaknya; (6) MBS menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, seperti pada sekolah-sekolah swasta, sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan, hal ini kemudian akan meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah; (7) adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelolaan sekolah menjadi lebih akuntabel, transparansi, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan; dan (8) prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua.

Sehingga dapat disimpulkan Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana yang kondusif.³²

³²E. Mulyasa, *Op.cit* h.13

Sementara itu baik berdasarkan kajian pelaksanaan di negara-negara lain, maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU sisdiknas NO. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat pasal 55 ayat 1 : Masyarakat berhak Menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek yaitu: *kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.*

- 1) MBS bertujuan mencapai mutu *quality* dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolok ukur penilaian pada hasil *output* dan *outcome* bukan pada metodologi atau prosesnya. Mutu dan relevansi ada yang memandangnya sebagai satu kesatuan substansi, artinya hasil pendidikan yang bermutu sekaligus yang relevan dengan berbagai kebutuhan dan konteksnya. Bagi yang memisahkan keduanya, maka mutu lebih merujuk pada dicapainya tujuan spesifik oleh siswa (lulusan), seperti nilai ujian atau prestasi lainnya, sedangkan relevansi lebih merujuk pada manfaat dari apa yang diperoleh siswa melalui pendidikan dalam berbagai lingkup/tuntutan kehidupan (*dampak*), termasuk juga ranah pendidikan yang tidak diujikan.
- 2) MBS bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh

layanan pendidikan yang bermutu disekolah yang bersangkutan. Dengan asumsi bahwa setiap anak berpotensi untuk belajar, maka MBS memberi keleluasaan kepada setiap sekolah untuk menangani setiap anak dengan latar belakang social ekonomi dan psikologis yang beragam untuk memperoleh kesempatan dan layanan yang memungkinkan semua anak dan masing-masing anak berkembang secara optimal. Sungguhpun antara sekolah harus saling memacu prestasi, tetapi setiap sekolah harus melayani setiap anak (bukan hanya yang pandai), dan secara keseluruhan sekolah harus mencapai standar kompetensi minimal bagi setiap anak yang diluluskan. Keadilan ini begitu penting, sehingga para ahli sekolah efektif menyingkat tujuan sekolah efektif hanya mutu dan keadilan atau *quality and equity*.

- 3) MBS bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Efektifitas berhubungan dengan proses, prosedur, dan ketepatan-gunaan semua input yang dipakai dalam proses pendidikan disekolah, sehingga menghasilkan hasil belajar siswa seperti yang diharapkan (sesuai tujuan). Efektif tidaknya suatu sekolah diketahui lebih pasti setelah ada hasil, atau dinilai hasilnya. Sebaliknya untuk mencapai hasil yang baik, diupayakan menerapkan indikator-indikator atau ciri-ciri sekolah efektif. Dengan menerapkan MBS diharapkan setiap sekolah, sesuai kondisi masing-masing, dapat menerapkan metode yang tepat (yang dikuasai), dan input lain yang tepat pula (sesuai

lingkungan dan konteks social budaya), sehingga semua input tepat guna dan tepat sasaran. Atau dengan kata lain, efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, efisiensi berhubungan dengan nilai uang yang dikeluarkan atau harga (cost) untuk memenuhi semua input (proses dan semua input yang digunakan dalam proses) dibandingkan atau dihubungkan dengan hasilnya (hasil belajar siswa).

- 4) MBS bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stake holders. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas semua yang dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya. Selama ini pertanggung jawaban sekolah lebih pada masalah administrative keuangan dan bersifat vertical sesuai jalur birokrasi. Pertanggung jawaban yang bersifat teknis edukatif terbatas pada pelaksanaan program sesuai petunjuk dan pedoman dari pusat (pusat dalam arti nasional, maupun pusat-pusat birokrasi di bawahnya), tanpa pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program.³³

d. Langkah-langkah MBS

Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi MBS akan berhasil melalui strategi- strategi berikut ini:

Pertama, sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya otonomi

³³Umaedi, *Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: CEQM 2004) h.35

dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil.

Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif, dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum. Sekolah harus lebih banyak mengajak lingkungan dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah adalah bagian dari masyarakat luas.

Ketiga, kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam MBS berperan sebagai designer, motivator, fasilitator. Bagaimanapun kepala sekolah adalah pimpinan yang memiliki kekuatan untuk itu. Oleh karena itu, pengangkatan kepala sekolah harus didasarkan atas kemampuan manajerial dan kepemimpinan dan bukan lagi didasarkan atas jenjang kepangkatan.

Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi dari bawah. Konsumen yang harus dilayani kepala sekolah adalah murid dan orang tuanya, masyarakat dan para guru. Kepala sekolah jangan selalu menengok ke atas sehingga hanya menyenangkan pimpinannya namun mengorbankan masyarakat pendidikan yang utama.

Kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara bersungguh-sungguh. Untuk bisa memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing harus ada sosialisasi terhadap konsep MBS itu sendiri. Siapa

kebagian peran apa dan melakukan apa, sampai batas-batas nyata perlu dijelaskan secara nyata.

Keenam, adanya guidelines dari departemen pendidikan terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Guidelines itu jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah. Artinya, tidak perlu lagi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan MBS, yang diperlukan adalah rambu-rambu yang membimbing.

Ketujuh, sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggung jawabannya setiap tahunnya. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah terhadap semua stakeholder. Untuk itu, sekolah harus dijalankan secara transparan, demokratis, dan terbuka terhadap segala bidang yang dijalankan dan kepada setiap pihak terkait.

Kedelapan, Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa. Perlu dikemukakan lagi bahwa MBS tidak bisa langsung meningkatkan kinerja belajar siswa namun berpotensi untuk itu.

Kesembilan, implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing pembangunan kelembagaan *capacity building* mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan dilapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan.³⁴

³⁴ Nurkholis, *Opcit.* hal 132

Bagi sekolah yang sudah beroperasi (sudah ada / jalan) paling tidak ada 6 (enam) langkah, yaitu : 1) evaluasi diri *self assessment*; 2) Perumusan visi, misi, dan tujuan; 3) Perencanaan; 4) Pelaksanaan; 5) Evaluasi; dan 6) Pelaporan.³⁵

Masing-masing langkah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Evaluasi diri *self assessment*

Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi sekolah yang ingin, atau akan melaksanakan manajemen mutu berbasis sekolah. Kegiatan ini dimulai dengan curah pendapat *brainstorming* yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, dan diikuti juga anggota komite sekolah. Prakarsa dan pimpinan rapat adalah kepala sekolah. Untuk memancing minat acara rapat dapat dimulai dengan pertanyaan seperti: *Perlukah Pelaksanaannya di Indonesia.* (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 19990 h.3 kita meningkatkan mutu? seperti apakah kondisi sekolah / madrasah kita dalam hal mutu pada saat ini? Mengapa sekolah kita tidak/belum bermutu?

Kegiatan ini bertujuan:

- a) Mengetahui kondisi sekolah saat ini dalam segala aspeknya (seluruh komponen sekolah), kemajuan yang telah dicapai, maupun masalah-masalah yang dihadapi ataupun kelemahan yang dialami.
- b) Refleksi/Mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran / keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu, sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu *sense of quality*.

³⁵Rumtini dan Jiyono. *Manaj. Berbasis Sekolah : Konsep dan Kemungkinannya Strategi dan Pelaksanaannya di Indonesia.*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.

- c) Merumuskan titik tolak *point of departure* bagi sekolah/madrasah yang ingin atau akan mengembangkan diri terutama dalam hal mutu. Titik awal ini penting karena sekolah yang sudah berjalan untuk memperbaiki mutu, mereka tidak berangkat dari nol, melainkan dari kondisi yang dimiliki.

2) Perumusan Visi, Misi, dan tujuan

Bagi sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan, perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal / pertama yang harus dilakukan yang menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri/ penyelenggara pendidikan. Dalam kasus sekolah/madrasah negeri kepala sekolah bersama guru mewakili pemerintah kab/kota sebagai pendiri dan bersama wakil masyarakat setempat ataupun orang tua siswa harus merumuskan kemana sekolah kemas depan akan dibawa, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam UU No. 23 th 2003 tentang Sisdiknas.

Kondisi yang diharapkan / diinginkan dan diimpikan dalam jangka panjang itu, kalau dirumuskan secara singkat dan menyeluruh disebut visi. Keadaan yang diinginkan tersebut hendaklah ada kaitannya dengan idealisme dan mutu pendidikan . Idealisme disini dapat berkaitan dengan kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, keluhuran budi pekerti, ataupun kualitas pendidikan sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.³⁶

Sedangkan misi, merupakan jabaran dan visi atau merupakan komponen - komponen pokok yang harus direalisasikan untuk mencapai

³⁶ Eti Rochaeti, dkk, *sist. Informasi Manaj. Pend.* (Bumi aksara: 2005) cet 1 h.119

visi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, misi merupakan tugas-tugas pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi.³⁷

Tujuan merupakan tahapan antara, atau tonggak-tonggak penting antara titik berangkat (kondisi awal) dan titik tiba tujuan akhir yang rumusannya tertuang dalam bentuk visi-misi. Tujuan-tujuan antara ini sebagai tujuan jangka menengah kalau tiba saatnya berakhir (tahun yang ditetapkan) akan disusul dengan tujuan berikutnya, sedangkan visi dan misi (relatif/pada umumnya) masih tetap.

Tujuan (jangka menengah), dipenggal-penggal menjadi tujuan tahunan yang biasa disebut target/sasaran, dalam formulasi yang jelas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan-tujuan jangka pendek (1 tahun) inilah yang rincian persiapannya dalam bentuk perencanaan.

3) Perencanaan

Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab : apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan tujuan (tujuan-tujuan) yang telah ditetapkan / disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain perencanaan adalah kegiatan menetapkan lebih dulu tentang apa - apa yang harus dilakukan, prosedurnya serta metode pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau satuan organisasi.

³⁷ Doretea Wahyu Ariyani, *Manajemen Kualitas*, (Yogyakarta : Andi Ofset, 1999)

Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang apa-apa yang akan dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam bentuk tertulis. Dikatakan teliti karena ia harus menjelaskan apa yang akan dilakukan, seberapa besar lingkup cakupan kuantitatif dan kualitatif yang akan dikerjakan, bagaimana, kapan dan berapa perkiraan satuan-satuan biayanya, serta hasil seperti apa yang diharapkan.

4) Pelaksanaan

Apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/penggerakkan atau pimpinan dan kontrol/pengawasan serta evaluasi, maka langkah pertama sampai dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan (untuk sekolah) sudah dibahas. Didalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih mikro (kecil) baik yang terkait dengan penggalan waktu (bulanan, semesteran, bahkan mingguan), atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya.

Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya (efektif dan efisien). Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan.

Peran masing-masing itulah yang perlu disoroti didalam manajemen mutu berbasis sekolah.

a. Peran kepala sekolah/Madrasah

Dengan kedudukan sebagai manajer kepala sekolah/Madrasah bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Sebagai perencana, kepala sekolah mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah dan mengidentifikasi serta merumuskan cara-cara (metoda) untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran dalam fungsi ini mencakup: penetapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur kerja disekolah /madrasah, pembuatan rencana, dan peramalan apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang.

b. Peran Guru dan Staf Sekolah

Peran guru (staf pengajar) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran kepala sekolah, hanya lingkupnya yang berbeda. Dalam lingkup yang lebih kecil (mikro) yaitu mengelola proses pembelajaran sesuai kelompok belajar atau bidang studi yang dipegangnya, setiap guru memahami visi dan misi sekolah, merencanakan proses pembelajaran, (mengorganisasikan bahan, siswa, mensinergikan dengan metoda dan sumber belajar yang tepat yang ia kuasai), menerapkan kepemimpinan yang demokratis dan memberdayakan siswa dengan mengambil keputusan sesuai kewenangan yang ia miliki dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan guru lain, dengan siswa, dengan kepala sekolah dan orang tua. Ia juga memonitor kemajuan siswa, serta melakukan evaluasi perkembangan

setiap anak sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran secara terus menerus. Guru juga memberi penghargaan bagi siswa yang menunjukkan kemajuan dalam belajar (berprestasi) serta memberikan semangat/dorongan (motivasi) serta membantu siswa yang prestasinya kurang/belum memuaskan.

c. Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat

Peran orang tua siswa dan masyarakat sudah lama dikenal sebagai pusat-pusat pendidikan yang penting di dalam mengembangkan anak (menjadi pribadi mandiri dengan segala keterampilan hidupnya) bersama-sama dengan sekolah sebagai institusi formal yang terencana, terstruktur, dan teratur melaksanakan fungsi pendidikan.

d. Peran Siswa

Siswa atau murid merupakan subjek utama dan konsumen utama *primebeneficiary* dari segala upaya yang dilaksanakan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersama manajemen yang terlibat didalamnya. Dalam posisinya yang menjadi subjek tujuan pendidikan itu, maka keinginan dan harapan mereka, motivasi mereka, serta komitmen keterlibatan mereka menjadi penting. Salah satu cara untuk mengakomodasi kepentingan mereka adalah dengan mendengarkan suara mereka.

5) Evaluasi

Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam MBS merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah didalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat

sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi pada tahap ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan yaitu bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Sungguhpun demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan focus pada capaian hasil (prestasi belajar siswa).

6) Pelaporan

Pelaporan disini diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan *stake holders*, mengenai aktifitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut.

Kegiatan pelaporan sebenarnya merupakan kelanjutan kegiatan evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan hasil evaluasi secara resmi kepada berbagai pihak sebagai pertanggung jawaban mengenai apa-apa yang telah dikerjakan oleh sekolah beserta hasilnya. Hanya perlu dicatat disini bahwa sesuai keperluan dan urgensinya tidak semua hasil evaluasi masuk kedalam laporan (pelaporan). Ada hasil evaluasi tertentu yang pemanfaatannya bersifat internal (untuk kalangan dalam sekolah sendiri), ada yang untuk kepentingan eksternal (pihak luar), bahkan masing-masing

stake holder mungkin memerlukan laporan yang berbeda fokusnya. Disamping itu, sebagai dokumen tertulis resmi, yang menyangkut pertanggungjawaban serta reputasi lembaga pendidikan, sungguhpun isinya harus berdsarkan data dan informasi yang benar laporan memiliki tujuan tertentu sesuai dengan peran institusi yang dikirimi atau pembacanya.

E. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan. Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu pendidikan, kita lihat terlebih dahulu pengertian mutu pendidikan. Mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).³⁸

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif, dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik. Sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalkan hasil tes prestasi belajar.³⁹

³⁸ Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, depdikbud, *kamus besar bahasa Indonesia*, (jakarta Balai Pustaka, 1999) cet. 10, h.677

³⁹ Oemar hamalik, *Evaluasi kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990) cet. ke 1 h.33

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad. Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/ standar yang berlaku.⁴⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bicara pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan kehidupan masyarakat.

2. Indikator Mutu Pendidikan

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan yaitu:

- a. Hasil akhir pendidikan
- b. Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik
- c. Tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan. Misalnya tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala rating, dan skala sikap.
- d. Proses pendidikan
- e. Instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa)
- f. *Raw input* dan lingkungan⁴¹

⁴⁰ Dzaujak Ahmad, *Pemunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar*, (Jakarta: Depdikbud 1996), h.8

⁴¹ Nurhasan, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21, Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-Ffaktor yang Mempengaruhi mutu Pendidikan*, (Jakarta, PT. Sindo, 1994) h. 390

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun dan sebagainya). Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UN, dan lain-lain), dapat pula prestasi di bidang lain misalnya dalam cabang olah raga atau seni. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang *intangibile* seperti suasana disiplin. Keakraban, saling menghormati dan sebagainya.

Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input. Seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah dukungan administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Antara proses dan pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses itu tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil *output* harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah, dan jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun kurun waktu tertentu. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil *output* yang ingin dicapai.

Adapun instrumental input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa) seperti guru yang harus memiliki komitmen yang tinggi dan total serta kesadaran untuk berubah dan mau berubah untuk maju, menguasai ajar dan metode mengajar yang tepat, kreatif, dengan ide dan gagasan baru tentang cara mengajar maupun materi ajar, membangun kenerja dan disiplin diri yang baik dan mempunyai sikap positif dan antusias terhadap siswa, bahwa mereka mau diajar dan mau belajar. Kemudian sarana dan prasarana belajar harus tersedia dalam kondisi layak pakai, bervariasi sesuai kebutuhan, alat peraga sesuai dengan kebutuhan, media belajar disiapkan sesuai kebutuhan. Biaya pendidikan dengan sumber dana, budgeting, kontrol dengan pembukuan yang jelas. Kurikulum yang memuat pokok-pokok materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, realistik, sesuai dengan fenomena kehidupan yang sedang dihadapi. Tidak kalah penting metode mengajar pun harus dipilih secara variatif, disesuaikan dengan keadaan, artinya guru harus menguasai berbagai metode.

Begitu pula dengan *raw input* dan lingkungan, yaitu siswa itu sendiri. Dukungan orang tua dalam hal ini memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan, selalu mengingatkan dan peduli pada proses belajar anak di rumah maupun di sekolah.

3. Langkah-langkah Peningkatan Mutu Pendidikan

Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak sederhana yang dipikirkan karena butuh perbaikan yang berkelanjutan, berikut ini langkah-langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

1. Memperkuat Kurikulum

Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman belajar siswa, dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan keahlian, dan dalam membentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Saat ini, memang telah dilakukan upaya-upaya untuk semakin meningkatkan relevansi kurikulum dengan melakukan revisi dan uji coba kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum uji coba tersebut didasarkan pada pendekatan yaitu: (1) Penguasaan aspek kognitif dalam bentuk kemampuan, (2) penguasaan aspek afektif yang lebih komprehensif, dan (3) penguasaan aspek keterampilan dalam bentuk kapasitas profesional. Kompetensi itu hendaknya dapat membentuk suatu kapasitas yang utuh dan komprehensif sehingga tidak direduksi menjadi keterampilan siap pakai.

Kompetensi yang berada dalam suatu keutuhan dan komprehensif dengan kapasitas lainnya. Kompetensi mensyaratkan tiga elemen dasar yaitu *basic, knowledge, skill (intellectual skill, participation skill), and disposition*. Melalui proses pembelajaran yang efektif, dari tiga elemen dasar ini dapat dibentuk kompetensi dan komitmen untuk setiap keputusan yang diambil. Kapasitas ini harus menjadi muatan utama kurikulum dan menjadi landasan bagi pengembangan proses pembelajaran dalam rangka pembentukan kompetensi.

2. Memperkuat Kapasitas Manajemen Sekolah

Dewasa ini telah banyak digunakan model-model dan prinsip-prinsip manajemen modern terutama dalam dunia bisnis untuk kemudian diadopsi dalam

dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi dalam dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi adalah *School Based Management*.

Dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan, model ini mulai dikembangkan untuk diterapkan. Diproposisikan bahwa manajemen berbasis sekolah (MBS) : (1) akan memperkuat rujukan referensi nilai yang dianggap strategis dalam arti memperkuat relevansi, (2) memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan Kegiatan pendidikan, (3) memperkuat preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik individu maupun kelembagaan, dan (4) memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi kelembagaan sekolah.

3. Memperkuat Sumber Daya Tenaga Kependidikan

a. Memperkuat Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan

Dalam jangka panjang, agenda utama upaya memperkuat sumber daya tenaga kependidikan ialah dengan memperkuat sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian. Keahlian baru itu adalah modal manusia (human investmen), dan memerlukan perubahan dalam sistem pembelajarannya.

Di abad ke-21 perolehan keahlian itu memerlukan perubahan dalam sistem pembelajaran karena alasan: (1) keahlian yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan akan semakin tinggi dan berubah sangat cepat, (2) Keahlian yang diperlukan sangat tergantung pada teknologi dan inovasi baru, maka banyak dari keahlian itu harus dikembangkan dan dilatih melalui pelatihan dalam pekerjaan, dan (3) kebutuhan akan keahlian itu didasarkan pada keahlian individu.

b. Memperkuat Kepemimpinan

Dalam fondasi berbagai karakteristik pribadi, pimpinan lembaga pendidikan perlu menciptakan visi untuk mengarahkan lembaga pendidikan dan karyawannya. Dalam konteks ini, penciptaan visi yang jelas akan menumbuhkan komitmen karyawan terhadap kualitas, memfokuskan semua upaya lembaga pendidikan pada rumusan kebutuhan pengguna jasa pendidikan, menumbuhkan sense of team work dalam pekerjaan, menumbuhkan *standard of excellence*, dan menjebatani keadaan lembaga pendidikan sekarang dan masa yang akan datang.

c. Meningkatkan Mutu Mengajar Melalui Program Inovatif Berbasis Kompetensi

Selama ini sekolah terutama guru masih sangat terbatas dalam melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Disisi lain, upaya untuk memperkuat kemampuan mengajar telah diupayakan melalui berbagai jenis penataran, pendidikan, ataupun pelatihan-pelatihan. Melalui berbagai kegiatan tersebut dikenalkan pada inovasi-inovasi pembelajaran. Tetapi dari pengalaman empirik tampaknya upaya-upaya itu belum secara signifikan membawa perubahan dalam arti peningkatan mutu hasil belajar. Pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pengembangan sistem evaluasi, dan pengembangan MBS. Kebutuhan akan inovasi itu dapat dilihat dalam dua hal yaitu untuk kepentingan inventions dan untuk kepentingan perubahan kultural sekolah, sehingga terbangun suatu kultur yang (1) berorientasi inovasi, (2) menumbuhkan kebutuhan untuk terus maju dan meningkat, (3) kebutuhan untuk berprestasi, (4) inovasi adalah sebagai suatu kebutuhan.

d. Mengoptimalkan Fungsi-Fungsi Tenaga Kependidikan

Di sekolah-sekolah selama ini yang berperan utama adalah guru. Seorang guru melaksanakan berbagai fungsi baik fungsi mengajar, konselor, teknisi, maupun pustakawan. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu terdapat guru mengajar bukan berdasarkan keahliannya. Kondisi ini jelas kurang menguntungkan bagi terselenggaranya suatu proses pendidikan yang baik diperlukan fungsi-fungsi kependidikan yang saling mendukung, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang maksimal.

4. Perbaikan yang berkesinambungan

Perbaikan yang berkesinambungan berkaitan dengan komitmen (*Continuos quality Improvement* atau CQI) dan proses *Continuous pross Improvement*. Komitmen terhadap kualitas dimulai dengan pernyataan dedikasi pada misi dan visi bersama, serta pembedayaan semua persiapan untuk secara inkremental mewujudkan visi tersebut (Lewis dan smith, 1994). Perbaikan yang berkesinambungan tergantung kepada dua unsur. Pertama, mempelajari proses, alat, dan keterampilan yang tepat. Kedua, menerapkan keterampilan baru small achieveable project. Proses perbaikan berkesinambungan yang dapat dilakukan berdasarkan siklus PDCA *Plan, Do, Check, Action*. Siklus ini merupakan siklus perbaikan yang never ending, dan berlaku pada semua fase organisasi/lembaga.⁴²

5. Manajemen berdasarkan fakta

Pengambilan keputusan harus didasarkan pada fakta yang nyata tentang kualitas yang didapatkan dari berbagai sumber diseluruh jajaran organisasi.

⁴² Syafaruddin, *Manajemen mutu Terpadu dalam Pendidikan*, (Jakarta:Grasindo), h. 19

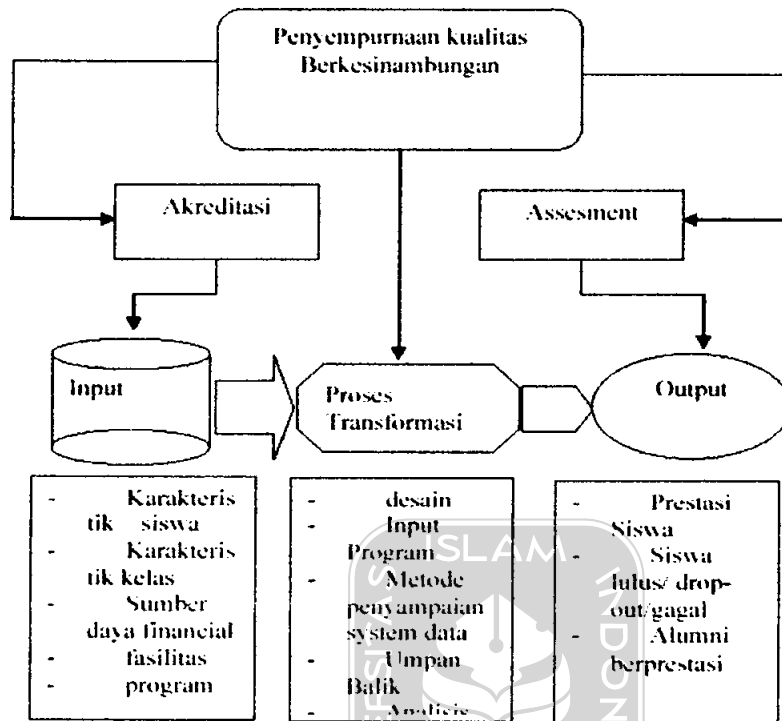
Jadi, tidak semata-mata atas dasar intuisi, praduga, atau organizational politik.

Berbagai alat telah dirancang dan dikembangkan untuk mendukung pengumpulan dan analisis data, serta pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Sebenarnya banyak sekali aspek yang turut menentukan mutu pendidikan di sekolah.

Bahwa yang menentukan mutu pendidikan mencakup aspek-aspek berikut: pembinaan yang berkelanjutan, guru yang profesional, nilai-nilai moral yang luhur, hasil ujian yang gemilang, dukungan orang tua, komunitas bisnis dan komunitas lokal, kepemimpinan yang tangguh dan berarah tujuan, kepedulian dan perhatian pada anak didik, kurikulum yang seimbang, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

Dari sejumlah aspek yang dikemukakan diatas, satu hal yang paling menentukan adalah bagaimana menjalankan manajemen mutu pendidikan itu sendiri Menurut W. Edward deming 80% dari masalah mutu lebih disebabkan oleh manajemen, dan sisanya 20% oleh SDM. Hal ini berarti bahwa mutu yang kurang optimal berawal dari manajemen yang tidak profesional dan manajemen yang tidak profesional artinya mencerminkan kepemimpinan dan kebijakan yang tidak profesional pula.⁴³

⁴³ Sallis, Edward, *Total Quality Manajemen in Education Manajemen Mutu Pendidikan*, IRCiSoD, Alih Bahasa Ahmad A. Riyadi et al.,Jokjakarta, 2006.



Gambar. 2.I *Penyempurnaan kualitas berkesinambungan dalam pendidikan*

Sejalan dengan konsep itu, dirjen dikdasmen depdiknas menetapkan bahwa ukuran mutu pendidikan disekolah mengacu pada derajat keunggulan setiap komponennya, bersifat relatif, dan selalu ada dalam perbandingan. Ukuran sekolah yang baik bukan semata-mata dilihat dari kesempurnaan komponennya dan kekuatan yang di miliknya, melainkan diukur dari kemampuan sekolah dalam mengantisipasi perubahan, konflik, serta kekurangan atau kelemahan yang ada dalam sekolah tersebut (dengan menggunakan analisis SWOT).⁴⁴

⁴⁴ Fredy Rangkuti, *analisis SWOT Teknik membedah kasus bisnis berorientasi konsep perencanaan strategi untuk menghadapi abad 21*, (jakarta:PT Gramedia utama, 2002), h. 3

F. Kerangka Berfikir

Lembaga pendidikan formal atau sekolah dikonsepsikan untuk mengembangkan fungsi reproduksi, penyadaran dan mediasi secara simultan. Fungsi-fungsi sekolah itu diwadahi melalui proses pendidikan dan pembelajaran sebagai inti bisnisnya. Pada proses pendidikan dan pembelajaran itulah terjadi aktivitas kemanusiaan dan pemanusiaan sejati. Tiga pilar fungsi sekolah yakni fungsi pendidikan sebagai penyadaran; fungsi progresif pendidikan dan; fungsi mediasi pendidikan⁴⁵

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau *School based management*. (SBM) bukanlah sesuatu yang asli Indonesia, meskipun esensi tertentu sebenarnya sudah berada (eksis) di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka yang terbukti dengan adanya berbagai lembaga pendidikan swasta (swadaya masyarakat), bahkan sebagian besar berbentuk lembaga pendidikan tradisional. baik yang berlandaskan agama maupun budaya.

Sebagai konsep, MBS telah diterapkan di beberapa negara maju, tetapi sebagai model manajemen yang terkait dengan sistem pendidikan setempat (negara yang bersangkutan), maka tidak ada satupun model yang sama antara model penerapan di negara yang satu dengan negara yang lain. Demikian juga penerapannya di Indonesia sangat terkait dengan sistem pemerintahan (yang baru mengalami perubahan besar dan implementasinya masih terus berkembang), sistem pendidikan, kebijakan yang mendukung, serta pengalaman-pengalaman

⁴⁵ *Danim, Sudarwan. 2007. Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik. Jakarta: Bumi Aksara.*

masa lalu yang dapat digunakan sebagai guru terbaik disamping mengambil manfaat dari pengalaman negara lain, agar tidak perlu mengulang kesalahan yang sama.

Keberhasilan penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah sangat ditentukan *political will* pemerintah dan kepemimpinan di persekolahan. Ironisnya selama ini, *political will* tersebut tidak utuh sebagai pendukung utama, demikian juga kepemimpinan di persekolahan yang cenderung memakai pendekatan birokratis hirarkis dan bukannya demokratis.⁴⁶

Tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah suasana masyarakat (semua pihak) yang menghendaki desentralisasi (otonomi), transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, serta dorongan peningkatan peran masyarakat dalam hampir semua kebijakan dan layanan publik, termasuk pendidikan.

Transformasi menuju sekolah bermutu terpadu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, staf, siswa, guru dan komunitas. Prosesnya diawali dengan mengembangkan visi dan misi mutu untuk wilayah dan setiap sekolah serta departemen dalam wilayah tersebut. Visi mutu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kostumer, mendorong keterlibatan total komunitas dalam program, mengembangkan sistem pengukuran nilai tambah pendidikan, menunjang sistem yang diperlukan staf dan siswa untuk mengelola perubahan, serta perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya keras membuat produk pendidikan menjadi lebih baik.

⁴⁶Bafadal, Ibrahim. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, dari Sentralisasi menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Agar sekolah mengembangkan fokus mutu, setiap orang dalam sistem sekolah mesti mengakui bahwa setiap output lembaga pendidikan adalah kostumer. Dalam survai terakhir atas 150 pengawas sekolah untuk mengukur pemahaman mereka atas mutu, rupanya 35% responden yang disurvei menunjukkan, mereka tak yakin bila sekolah itu memiliki kostumer. Memang masih lebih banyak pihak dalam komunitas pendidikan yang mengakui adanya kostumer untuk tiap keluaran pendidikan, tapi mutu pendidikan tak kunjung diperbaiki.⁴⁷

Konkritnya, keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi, UU No.25 Tahun 2000 tentang Propenas, dan Kepmemdiknas No. 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan olah raga tahun 2000-2004, serta UU Sisdiknas Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah atau *.School Based Management.* dan pendidikan yang berbasis masyarakat atau *.Community based education.* sebagai sebuah inovasi pendidikan untuk mencapai pendidikan yang lebih sempurna dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁴⁷ Arcaro, Jarome S. 2006. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan.* Yogyakarta.

Ho : Tidak terdapat hubungan positif antara Implementasi MBS dengan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Ha : Terdapat hubungan positif antara Implementasi MBS dengan Peningkatan Mutu Pendidikan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 dan mengambil tempat di MI Al Huda Kel. Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang terletak di Jalan Raya KH Wakhid Hashim No 66 Pacitan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan penelitian deskriptif korelasional yaitu dengan menjelaskan dan menjabarkan berbagai teori yang diperlukan dalam penjabaran fakta-fakta yang ditemukan. Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik untuk mengungkapkan adanya hubungan antara penerapan konsep MBS dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana tempat yang menjadi objek penelitian.⁴⁸

⁴⁸ Kuncoro, Mudrajad, 2001, *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah guru dan Pengurus Komite MI Al Huda yang berjumlah 40 orang. Dalam kaitan ini peneliti mengambil sampel secara acak atau random sampling. Sampel yang diambil adalah sebanyak 20 orang yaitu 50% dari 40 orang guru dan Pengurus Komite sekolah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain:

1. Teknik Observasi

Observasi diartikan sebagai sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian, observasi ini dilakukan guna mendapatkan informasi tambahan dari hasil wawancara dan angket.

2. Angket

Metode angket yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal dalam satu bidang.⁴⁹

E. Instrumen Pengumpulan Data

1. Variabel Implementasi MBS (X)

a. Definisi Konseptual

Implementasi MBS di definisikan sebuah strategi untuk memajukan pendidikan dengan mentransfer keputusan penting memberikan otoritas dari

⁴⁹Koentjaraningrat, *metode-metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981)

negara dan pemerintah daerah kepada individu pelaksana di sekolah.

b. Definisi Operasional

MBS adalah operasionalisasi konsep yang masih bersifat potensial (tertulis) yang harus dilaksanakan di sekolah. Secara garis besar ada beberapa cakupan Implementasi MBS yang dapat dijadikan tolok ukur: (1) Manajemen Kurikulum, (2) Manaj. Tenaga kependidikan, (3) Manaj. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, (4) Manaj. Sarana dan Prasarana.

c. Kisi-kisi Variabel Implementasi MBS (X)

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Variabel X

| Variabel | Dimensi | Indikator | No Butir | Jumlah Soal |
|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| Pelaksanaan MBS | 1. Manaj. Kurikulum. | <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan program Pengajaran - Penusunan kalender Pendidikan. - Penetapan Pelaksanaan evaluasi Belajar | 1, 2, 3, | 4 |
| | 2. Manaj. Keuangan dan Pembiayaan | <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Anggaran - Sumber keuangan - Pengeluaran - Perekrutan Pegawai | 6, 8, 9, 10 | 4 |
| | 3. Manaj. Tenaga kependidikan | <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan - Pemberhentian Pegawai - Kompensasi - Reward | 7,11,13,14 | 4 |
| | 4. Manaj. Hubungan sekolah dengan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki agenda kegiatan yang dilakukan sekolah | 10,12,15,16 | 4 |
| | 5. Manaj Sarana Prasarana | <ul style="list-style-type: none"> - Tersediannya Fasilitas Penunjang Pembelajaran | 17,18,19,20 | 4 |

2. Variabel (Y) Peningkatan Mutu Peningkatan

a. Definisi Konseptual

Mutu Pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.

Ada empat unsur pembentuk sistem pengelolaan pendidikan yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan dan partisipasi masyarakat secara luas. Untuk mendorong tercapainya partisipasi yang tinggi, maka keempat unsur sistem ini harus sinergi dan berjalan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Keempat unsur pembentuk sistem ini adalah: (1) pemerintah sebagai penentu kebijakan; (2) sistem pendidikan sebagai subjek kebijakan; (3) KS/M sebagai pelaksana kebijakan; dan (4) satuan pendidikan sebagai sasaran kebijakan.

Keempat unsur sistem ini memiliki hubungan yang saling mempengaruhi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah sebagai otoritas penentu kebijakan, dengan mengeluarkan peraturan perundangan, tertuang dalam suatu rumusan konsep disebut dengan sistem pendidikan nasional, konsep ini diwujudkan oleh KS/M dengan sekolah/madrasah.⁴⁹

⁴⁹Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cetakan Pertama, Penerbit Paramadina, Jakarta, 1996.

b. Definisi Operasional

Manajemen Mutu Terpadu dapat memberikan fokus pada pendidikan dan masyarakat. Manajemen Mutu Terpadu membentuk infrastruktur yang fleksibel yang dapat memberikan respons yang cepat terhadap perubahan tuntutan masyarakat. Manajemen Mutu Terpadu dapat membantu pendidikan menyesuaikan diri dengan keterbatasan dana dan waktu. Manajemen Mutu Terpadu memudahkan sekolah mengelola perubahan. Transformasi menuju sekolah bermutu terpadu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, staf, siswa, guru dan komunitas.

Beberapa pandangan Juran (Arcaro, 2006:9) tentang mutu sebagai berikut:

- a. Meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir;
- b. Perbaikan mutu merupakan proses berkesinambungan, bukan program sekali jalan.
- c. Mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator.
- d. Pelatihan, misal merupakan prasyarat mutu.
- e. Setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan.⁵⁰

Yang dimaksud Mutu Pendidikan dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai apa saja yang menjadi faktor dalam meningkatkan mutu pendidikan yang mencakup: Siswa, Guru, Kurikulum, KBM, Manajemen Sekolah.

⁵⁰Arcaro, Jarome S. 2006. **Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan**. Yogyakarta.

c. Kisi-kisi Variabel Peningkatan Mutu Pendidikan

Tabel 3. 2 Kisi-kisi Instrumen Variabel Y

| Variabel | Dimensi | Indikator | No Butir | Jumlah Soal |
|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------|-------------|
| Peningkatan Mutu Pendidikan | 1. Mutu Siswa | - Kreativitas siswa - Nilai - Output Siswa | 1,2,3,4 | 4 |
| | 2. Mutu Guru | - Kemampuan Mengajar - Kompetensi Akademik - Motivasi dalam bekerja | 6,8,10,12 | 4 |
| | 3. Mutu pembelajaran | - Melakukan pengembangan Kurikulum | 7,9,11,13 | 4 |
| | 4. Mutu Belajar Siswa | - Memperbaiki proses Belajar di Kelas dan diluar kelas | 14, 17, 18, 19 | 4 |
| | 5. Mutu manajerial (pengelola) | - Melakukan Perbaikan berkesinambungan dalam berbagai aspek pendidika | 16, 15, 20, 5 | 4 |

Untuk menentukan scoring dalam hasil penelitian penulis memberikan lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert. Dengan ketetapan responden yang menjawab item positif diberi bobot nilai:

- a. Alternatif jawaban Selalu di beri skor 5
- b. Alternatif jawaban sering di beri skor 4
- c. Alternatif jawaban kadang-kadang di-beri skor 3
- d. Alternatif jawaban pernah di beri skor 2
- e. Alternatif jawaban tidak pernah di beri skor 1

Sedangkan untuk responden yang menjawab item negatif diberi bobot nilai:

- a. Alternatif jawaban selalu di beri skor 1
- b. Alternatif jawaban sering di beri skor 2

- c. Alternatif jawaban kadang-kadang di beri skor 3
- d. Alternatif jawaban pernah di beri skor 4
- e. Alternatif jawaban tidak pernah di beri skor 5

F. Teknik pengolahan data dan analisa data

1. Teknik pengolahan data

- a. Editing: memeriksa angket-angket yang telah di isi tentang kebenaran dan kelengkapannya, kemudian di kelompokkan sesuai dengan isinya.
- b. Tabulating: Membaut tabel-tabel untuk memasukkan jawaban-jawaban
- c. Responden yang kemudian di cari prosentasinya untuk di analisa.
- d. Analiting dan interpretasi: Menganalisa data yang telah di olah secara verbal sehingga hasil penelitian mudah dipahami.
- e. Concluding: Memberikan kesimpulan dari hasil analisa dan interpretasi data.

2. Analisa data

Setelah data yang penulis perlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data, penulis menggunakan uji hipotesis yang mencakup uji korelasi, uji signifikansi, dan koefisien determinasi. Secara rinci di jabarkan sebagai berikut:

a. Uji Korelasi

Untuk mengetahui tingkat korelasi antara hubungan Implementasi MBS dengan peningkatan mutu pendidikan, akan menggunakan rumus korelasi Product moment, yaitu salah satu teknik mencari korelasi antara dua variabel dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Angka Indeks Kolerasi "r" Product Moment

N = Number Of Cases

$\sum XY$ = Jumlah Hasil Perkalian Antara Sektor X dan Sektor Y

$\sum X$ = Jumlah Seluruh Sektor X

$\sum Y$ = Jumlah Seluruh Sektor Y

b. Uji Signifikansi

Setelah memperoleh nilai 'r' kemudian untuk mengetahui signifikansi korelasi yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengujian signifikansi dengan menggunakan rumus 't'

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

c. Koefisien determinasi

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y dilakukan dengan cara menentukan koefisien determinasi dengan rumus :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Kontribusi Variabel X terhadap Variabel Y

R2 = Koefisien Korelasi antara variabel X terhadap Variabel Y

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Potret MI Al Huda

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dan Islam sebagai kurikulum dalam perspektif universal pendidikan Islam, maka keberadaan dan aktivitas pendidikan Islam timbul sejak adanya manusia itu sendiri. Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan umumnya bersifat informal, dan inipun lebih berkaitan dengan upaya-upaya dakwah Islamiyyah atau penyebaran dan penanaman dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam.⁵¹

Di Indonesia, tidak diketahui secara pasti sejak kapan penggunaan istilah madrasah sebagai sebutan untuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Namun menurut Maksum, madrasah sebagai satu sistem pendidikan Islam berkelas (terdapat ruang kelas tertentu, meja, kursi, kapur, papan tulis, dan lainnya) dan mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu non-keagamaan sudah tampak sejak awal abad ke 20. Meskipun diantara lembaga-lembaga pendidikan tersebut, menggunakan istilah *school* (sekolah), tetapi dilihat dari sistem pendidikannya yang terpadu, lembaga pendidikan seperti itu bisa dikategorikan dalam bentuk madrasah.⁵²

⁵¹ Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernitas Menuju Milenium Baru*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

⁵² Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

MI Al Huda di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan adalah sekolah dasar yang bernafaskan Agama Islam yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Kelahirannya menawarkan pendidikan berbasis IMTAQ dan IPTEK. Lembaga ini berada di jalan Wakhid Hashim NO 66 Pacitan. Secara geografis, letaknya sangat strategis di sebelah barat TK. Raudlatul Athfal (RA) Al Huda dan di sebelah selatan ada masjid Al Huda Kel Ploso dan di beberapa radius sekitarnya terdapat berbagai lembaga pendidikan formal maupun non formal dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi. Hal ini tidak heran jika angka partisipasi orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di MI Al Huda sangat besar baik dari masyarakat di Kel Ploso maupun dari luar desa/Kel.

Secara filosofis MI Al Huda memiliki landasan epistemologi Islam yang kuat. Artinya MI Al Huda dalam kurikulumnya dibangun atas konsep ilmu Qur'ani, yaitu konsep ilmu yang memiliki nilai-nilai wahyu yang digali dari ayat-ayat kauniyah dan kauliyah. Epistemologi ilmu yang dibangun tidak hanya *rasionalitas-aqliyah*, tapi juga aspek *spiritual-ruhiyah*, atau juga disebut dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ).

MI Al Huda telah membuktikan dirinya melalui perjuangan panjang sejak keberadaan kelahirannya dari pesimisme "partisipasi rendah" hingga optimisme "partisipasi tinggi". Karya nyata MI Al Huda telah merubah minimal dua citra madrasah. *Pertama*, citra pendidikan Islam dikotomis. hadir dengan dua wajah atau model pendidikan Islam yang tidak membeda pisahkan (*dikotomis*) antara

ilmu agama dan ilmu umum, sebagaimana pemahaman kebanyakan umat Islam. *Kedua*, menepis citra madrasah termarginalkan, jumud, dan berbagai bentuk padanan istilah lainnya, dari sekolah nomor dua atau sekolah tempat persinggahan terakhir setelah di sekolah negeri non madrasah tidak diterima, menjadi sekolah unggul.

Di samping prestasi-prestasi akademik dan non akademik lainnya. Implementasi dapat dilihat dari berbagai inovasi-inovasi pengembangan kurikulum yang diterapkan di MI Al Huda, yaitu:

Bagi siswa:

- (1) *pada tahap seleksi penerimaan siswa baru untuk kategori agama siswa harus memiliki kemampuan membaca al-Qur'an, hafalan surah pendek, dan hafalan do'a harian;*
- (2) *pada muatan kurikulum terdapat mata pelajaran pendukung seperti: Qur'an Hadits, Aqida Akhlak, Bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Fiqh;*
- (3) *tiada hari tanpa mengaji (30 menit untuk kelas 1 dan 2, 15 menit untuk kelas 3-6 sebelum pelajaran dimulai;*
- (4) *program pembiasaan: sholat dhuha, dzuhur, dan Jum'ad bersama, mengaji, berperilaku mulia, dan gemar membaca;*
- (5) *memiliki kemampuan membaca al-Qur'an dengan lancar dan benar pada tahun keempat;*
- (6) *memiliki kebiasaan melaksanakan sholat lima waktu secara tertib; dan*

- (7) *memiliki kemampuan menghafal 25 surah pendek dan 10 hadits.*

Bagi guru dan pegawai administrasi:

- (1) *pada tahap seleksi rekrutmen guru dan tenaga kepegawaian, guru dan pegawai harus memiliki kemampuan mengaji atau membaca al-Qur'an;*
- (2) *meningkatkan kemampuan guru dan karyawan dalam membaca al-Qur'an;*
- (3) *mengaji bagi seluruh pegawai administrasi setiap hari 15 menit dari pukul 06.30.*

Aspek agama ini hampir oleh seluruh orang tua siswa sebagai faktor utama mendorong orang tua siswa menyekolahkan anaknya di MI Al Huda di samping aspek-aspek lainnya. Hal ini sebagaimana penuturan orang tua siswa :

"Alasan saya menyekolahkan anak di ini MI Al Huda adalah sebagai Ibu ingin membentengi diri dari penyakit-penyakit masyarakat, lingkungan, dan lainnya. Sehingga alasan utama adalah alasan Agama. Dengan memasukkan anak di kita MI Al Huda tidak perlu lagi memberikan les tambahan di luar sekolah baik les umum dan les ngaji. Kita sudah terima beres. Harapan untuk kedepane MI Al Huda pan lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal keagamaannya, misalnya hafalan do'a-do'a dan surah-surah pendek dalam al-Qur'an (wawancara)."

Strategi dan Pola Kerja Mendorong Partisipasi Masyarakat

Sebelum berupaya untuk menarik dukungan masyarakat luas agar berpartisipasi terhadap MI Al Huda, MI Al Huda melakukan berbagai strategi dan upaya membenahi internal sekolah untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Upaya

ini dilakukan untuk menarik dukungan masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di MI Al Huda, dengan target masyarakat yang seluas-luasnya tidak diperuntukkan untuk satu wilayah saja. Dengan mengharapkan orang tua siswa ikut serta mempublikasikan yang lebih luas lagi. Karena di era otonomi dan penerapan MBS pada sekolah, sekolah dituntut harus lebih kreatif dan inovatif mencari dana secara mandiri untuk membiayai sekolah.

Untuk mewujudkan cita-cita seperti tersebut di atas, MI Al Huda melakukan berbagai langkah dan strategi. Langkah-langkah dan strategi ini disebut sebagai elemen sukses. Hal ini dapat dilihat dalam profile MI Al Huda, tentang faktor-faktor keberhasilannya, minimal ada lima poin yaitu:

- (1) Kesungguhan dan kedisiplinan. Hal ini diberikan contoh oleh Kepala Madrasah untuk hadir pertama kali dengan memberikan ucapan selamat datang kepada siswa, guru, dan karyawan yang datang. Jika pemimpinnya lebih awal datang, tentunya akan memberikan beban psikologis bagi guru dan stafnya datang tidak tepat waktu. Bahwa kedisiplinan bukanlah sesuatu yang diteorikan tapi wujud nyata yang dicontohkan. Tidak hanya bagi kepala madrasah, kedisiplinan juga diterapkan bagi guru untuk memenuhi target-target proses pembelajaran sesuai dengan program dan juga disiplin organisasi, semua pendidik dan tenaga kependidikan bahkan peserta didik pun harus mematuhi disiplin organisasi. Siswa yang terlambat misalnya, harus diterapkan disiplin organisasi, dan disiplin organisasinya pun mendidik, seperti mengaji atau ikut senam, tutur seorang guru. Di

samping itu ada hal lain yang menarik, ketika peneliti bersama-sama menunaikan sholat Zhuhur berjama'ah di Masjid al- Huda, siswa-siswi ini berjejer lurus dan antri menunggu giliran berwudhu. Ketika dalam Masjid, suasananya pun menjadi hening, tertib, dan teratur;

- (2) Dukungan wali murid atau partisipasi orang tua siswa. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas, yang lebih besar, ada dua strategi yang dilakukan oleh MI Al Huda. Bahwa untuk mendapatkan partisipasi masyarakat khususnya orang tua siswa yang lebih besar, di MI Al Huda terakomodasi pada Komite Sekolah/Madrasah (KS/M).
- (3) Lingkungan dan layanan. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan cermin sikap tanggung jawab. Pelayanan yang optimal tetap perlu diberikan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bukan sekolah yang eksklusif, melainkan sekolah yang open manajemen;

Prestasi. Salah satu strategi yang terpenting, yang dilakukan oleh MI Al Huda untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk menyekolahkan anaknya hingga sekarang adalah aspek prestasi madrasah. Prestasi yang ingin diwujudkan MI Al Huda, tidak hanya prestasi akademik, tapi juga prestasi non akademik. Untuk prestasi akademik, MI Al Huda dapat mewujudkannya dengan prestasi yang mengembirakan. Prestasi-prestasi yang dicapainya melebihi target yang telah ditetapkan Sementara untuk prestasi non akademik, juga menjadi tujuan lembaga ini, baik di tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten maupun Tingkat

Provinsi. Bukan rahasia umum lagi, MI Al Huda tidak hanya mewujudkan prestasi akademik tapi juga non akademik.

Ada empat faktor atau elemen sukses internal yang mendorong partisipasi masyarakat terhadap MI Al Huda, elemen-elemen tersebut adalah: (1) manajemen; (2) organisasi; (3) administrasi; dan (4) kepemimpinan.

Manajemen Pengelolaan

Salah satu indikator keberhasilan sebuah lembaga modern adalah aspek manajemen. Aspek manajemen modern yang dikembangkan dalam sebuah lembaga dibelahan dunia dewasa ini adalah menerapkan sistem *Total Quality Manajemen* (TQM).⁵³

Hasil temuan menunjukkan MI Al Huda dalam manajemen pengelolaan madrasah menerapkan sistem TQM. Aspek kontrol mutu (*quality control*) pada MI Al Huda dapat ditandai dengan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama komite madrasah dalam melakukan fungsi kontrol (*controlling*) dan supervisi terhadap kualitas *in put*, *proses*, dan *out put*. Aspek jaminan mutu (*quality assurance*) pada MI Al Huda dapat ditandai dengan adanya jaminan kualitas *in put* siswa, kepala sekolah, guru, dan pegawai dan jaminan kualitas proses dengan menerapkan standar minimal nasional.

Aspek mutu terpadu (*total quality*) MI Al Huda dapat ditandai dengan semua system yang ada dalam MI Al Huda kualitas *in put* siswa, kepala sekolah, guru, pegawai, komite, pemerintah dan lingkungan mendukung sesuai fungsi dan

⁵³Sallis, Edward, *Total Quality Manajemen in Education Manajemen Mutu Pendidikan*, IRCiSoD, Alih Bahasa Ahmad A. Riyadi et.al., Jokjakarta, 2006.

peran masing-masing secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, TQM ini dapat pula dilihat pada penerapan MBS. Wujud konsep MBS adalah adanya pelibatan *stakeholders* dalam pengelolaan sekolah. TQM dalam MBS merupakan upaya untuk memenuhi standar nasional pendidikan minimal yang telah ditetapkan pemerintah bahkan melampauinya.

Merupakan era terbuka dan masyarakat yang kompetitif membutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang prima. SDM yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas pula. Wujud dari ini, di negara-negara maju sedang menerapkan sistem *Total Quality Manajemen* (TQM) dalam bidang pendidikan. Semua unsur dalam sistem atau organisasi bergerak secara inovatif dan produktif.⁵⁴

MI Al Huda, menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan PP No.19/2006, dan untuk mencapai visi-misi dan tujuan MI Al Huda, maka diperlukan inovasi-inovasi di bidang kurikulum dan pembelajaran. Inovasi-inovasi kurikulum tersebut meliputi:

- (1) Tiada hari tanpa mengaji (30 menit untuk kelas 1 dan 2, 15 menit untuk kelas 3-6 sebelum pelajaran dimulai);
- (2) Penilaian berbasis kelas dengan didukung sistem aplikasi komputer;
- (3) Guru kelas (1-3) dan guru bidang studi (4-6);
- (4) Acak kelas (sistem heterogen) setiap tahun,

⁵⁴Tilaar, H.A.R., *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Cetakan Pertama, Terra Indonesia, Jakarta, 1998.

- (5) Program pembiasaan: sholat Dhuha, Zhuhur, dan Jum'ad bersama, mengaji, berperilaku mulia, dan gemar membaca;
- (6) Kriteria ketentuan minimal 7,5 dan dilakukan peninjauan ulang setiap tahun;
- (7) Bimbingan sukses UNAS (Ujian Nasional) untuk siswa kelas VI dan *Remedial Teaching* untuk siswa yang lamban belajar, dan
- (8) Alokasi waktu pada kalender pendidikan: minggu efektif belajar 34 minggu dan maksimum 38 minggu, jeda antar semester maksimum 1 minggu, jeda antar semester maksimum 2 minggu, dan libur akhir tahun pelajaran maksimum 2 minggu.

Standar proses, pada aspek ini, tidak hanya peserta didik, tapi juga pendidik dan tenaga kependidikan diharuskan memenuhi standar ini. Standar proses pada peserta didik, misalnya: MI Al Huda menerapkan pembelajaran dengan pendekatan PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Pendekatan ini terbukti efektif. Indikatornya dapat dilihat dari daya serap siswa, kualitas *out putnya*, dan juga dari respon peserta didik terhadap proses belajar di MI Al Huda. Hasil temuan menunjukkan bahwa semua peserta didik merasa senang dan enjoy mengikuti proses belajar mengajar. Jenis kesenangan terhadap proses belajar mengajar berbeda-beda, ada yang senang dengan pelajaran matematika, ada juga Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan ada juga bahasa Indonesia dan pelajaran lainnya. Jenis kesukaan ini tergantung pada daya tarik mereka terhadap guru dan kemampuan mereka memahami mata pelajaran tertentu. Unsur-unsur dalam standar ini adalah: kualitas standar input:

guru, siswa, sarana pembelajar yang seimbang. Misalnya *quality standar input* guru, ditentukan melalui seleksi yang memenuhi standar proses.

Tidak hanya siswa, guru, dan komite, orang tua siswa juga diberikan tugas khusus untuk mengontrol putra-putrinya pada saat jam di luar sekolah. Strategi yang digunakan untuk mengontrol aktivitas peserta didik di luar sekolah adalah dengan menerapkan kontak kendali siswa. ini menuntut orang tua berperan serta secara aktif mendorong putra putrinya berprestasi. Di sini bagi orang tua yang menyadari pentingnya peran orang tua memberikan pendidikan di rumah dan pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar terhadap pembentukan karakter dan sikap anak.

Standar kompetensi lulusan. Kompetensi untuk seluruh mata pelajaran. Standar kelulusan, MI Al Huda telah melampau standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Pasal 26: meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan hidup mandiri, pada MI Al Huda dengan program pembiasaan: sholat Dhuha, Zhuhur, dan Jum'ad bersama, mengaji, berperilaku mulia, dan gemar membaca. Di MI Al Huda ini juga, ada siswa yang melampau target pencapaian sekolah dalam hal menghafal surah-surah pendek. Ada siswa yang sudah menghafal juz ketiga puluh (juz 'Ammah).

Sementara untuk dapat melanjutkan pendidikan lebih lanjut, lulusan (*output*) MI Al Huda , 100 persen terserap ke seluruh sekolah unggul di Kabupaten Pacitan maupun luar Kabupaten Pacitan. Dan hampir semua siswa khususnya kelas VI sudah siap-siap dan menentukan pilihan ke sekolah mana yang mereka harus meneruskan.

Standar sarana dan prasarana, Untuk menunjang proses belajar mengajar berstandar nasional, MI Al Huda juga memiliki sarana dan prasarana berstandar nasional yaitu: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan).

Standar pengelolaan. MI Al Huda menerapkan konsep MBS. Wujud dari konsep MBS adalah adanya lembaga partisipasi masyarakat atau KS/M di MI Al Huda yang berjalan secara efektif sesuai fungsi dan tugasnya. Di samping partisipasi melalui KS/M, MI Al Huda juga menggalang partisipasi melalui Orang Tua Siswa dan jaringan alumni. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas terhadap sekolah. Sistem pengelolaan MI Al Huda dengan menerapkan TQM. Agar sistem ini tetap berjalan secara efektif dan efisien, MI Al Huda mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung standar pengelolaan ini.

Standar pembiayaan, untuk menjaga dan mendorong etos dan produktivitas kinerja civitas akademika (satuan pendidikan), MI Al Huda melakukan pembiayaan sesuai standar minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Pendanaan melalui bantuan pemerintah (DIPA, BOP, dan BOS). Di samping itu juga, MI Al Huda menggalang dana melalui zakat mal, infaq, shodaqoh orang tua siswa dan lainnya yang halal dan tidak mengikat. Untuk menjaga kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang lebih besar, MI Al Huda dalam target bidang keuangan mengupayakan:

- (1) Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;

- (2) Meningkatkan sumber pendanaan madrasah selain dari anggaran negara (APBN/APBD); dan
- (3) Dalam manajemen keuangan dilakukan dengan berpedoman pada:
 - (a) RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah) yang dibuat setiap tahun berdasarkan kebutuhan MI Al Huda ;
 - (b) laporan keuangan tiap akhir tahun pelajaran kepada seluruh orang tua siswa; dan
 - (c) mengadakan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang dilakukan oleh KS/M di akhir masa jabatan (tiap 3 tahun sekali).Indikator transparansi dan akuntabel keuangan, MI Al Huda secara formal melaporkan seperti tersebut di atas, tapi juga dilaporkan secara non formal kepada seluruh *stakeholders* atau siapapun bisa mendapatkan informasi tersebut melalui website dan buletin Kontak MI Al Huda, setiap tiga bulan sekali terbit.

Sementara itu, untuk mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap MI Al Huda, maka diadakan kegiatan bersama orang tua siswa sebagai bentuk silaturahmi, yang dikemas dalam kegiatan-kegiatan keakraban dan pemahaman terhadap pentingnya partisipasi masyarakat terhadap sekolah.

Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan yang diterapkan di MI Al Huda adalah penilaian berbasis kelas dengan didukung sistem aplikasi komputer. Delapan standar nasional pendidikan ini telah diwujudkan oleh MI Al Huda, sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi. Upaya ini dilakukan oleh pihak komite dan sekolah untuk mendapatkan partisipasi dari orang tua siswa yang memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi

tentang pendidikan dan orang tua siswa yang memiliki kecukupan ekonomi. Wujud impian kepala MI Al Huda, Zaenal membangun madrasah berstandar nasional, dengan harapan besar untuk mendapatkan partisipasi masyarakat luas.

Sistem Organisasi:

Dari *Job description* Hingga Berbudaya Islami Roda organisasi MI Al Huda, berjalan seimbang sesuai garis kebijakan organisasi. Setiap bidang menjalankan tugas dan wewenang sesuai *job description* masing-masing. Begitu juga dengan kepala madrasah dan ketua komite madrasah. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kedua lembaga ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing sesuai *job descriptionnya*. Di samping job, kedua lembaga ini memiliki hubungan yang bersifat koordinatif. Karena garis kebijakan organisasi antara komite madrasah dengan MI Al Huda bersifat koordinatif, maka kedua lembaga ini memiliki peran yang sama. Kesamaan peran ini, kemudian ada yang menyebutnya dengan mitra kerja. Sebagai mitra kerja, komite madrasah dituntut bekerja sesuai fungsi dan wewenang masing-masing, begitu juga dengan pihak MI Al Huda .

Pada MI Al Huda, roda organisasi komite madrasah lebih diarahkan dan digerakkan pada aspek-aspek membangun kesadaran masyarakat khususnya orang tua siswa tentang pentingnya berpartisipasi terhadap sekolah, transparansi, akuntabel, dan demokratisasi khususnya pada wilayah-wilayah pengelolaan keuangan. Setiap setahun sekali, khususnya pada awal tahun ajaran baru, komite madrasah menyampaikan hal tersebut di atas dan mensosialisasikan program-program sekolah, mana yang menjadi tanggung jawab sekolah dan mana yang menjadi tanggung jawab orang tua siswa. Dan roda organisasi MI Al Huda ini,

berjalan efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan pembagian dan uraian tugas yang jelas dari unit terbesar hingga unit terkecil sesuai dengan *job discription* masing-masing.

Sebagai guru menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan job yang diamanahkan kepadanya, begitu juga kepala madrasah dan Komite Madrasah, menjalankan fungsi dan tugas sesuai job masing-masing. Semua berjalan sesuai dengan kaidah organisasi MI Al Huda, yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping adanya pembagian tugas yang jelas sesuai job masing-masing seperti tersebut di atas, pada MI Al Huda juga, terdapat adanya ketertiban koordinasi, harmonisasi organisasi dengan budaya Islami, adanya monitoring dan reorganisasi, ikhlas berkarya, dan mengedepankan nilai-nilai moral dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk mencapai budaya organisasi MI Al Huda yang Islami ini, MI Al Huda melakukan berbagai kegiatan yang secara khusus membentuk sikap mental dan moral seluruh elemen yang ada dalam organisasi secara rutin. Pendekatan yang digunakan untuk membentuk budaya organisasi Islami ini adalah pendekatan sentuhan spiritualitas.

Agar roda organisasi berjalan efektif dan efisien, MI Al Huda melakukan pembenahan organisasi. Pembenahan organisasi dimulai dengan target pembenahan bidang sarana dan prasarana dalam pelayanan pendidikan. Aspek ini dinilai sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Hal ini dapat dilihat pada target-target yang ingin dicapai MI Al Huda sebagai berikut:

Target sarana dan prasarana pelayanan:

- (1) *Terpenuhinya media pembelajaran yang standar;*

- (2) *Terciptanya lingkungan madrasah yang aman dan nyaman serta mendukung pembelajaran;*
- (3) *Tersedianya sarana pendukung pembelajaran yang standar; dan*
- (4) *Tertatanya sistem informasi madrasah yang standar.*

Target kepegawaian:

Meningkatnya kesejahteraan warga madrasah. Tujuan dan target bidang kesiswaan:

- (1) *Tercapainya peringkat tiga besar lomba mata pelajaran tingkat nasional,*
- (2) *Tercapainya prestasi olahraga dan seni tiga besar tingkat propinsi, dan*
- (3) *Tercapainya ketertiban siswa ketika beribadah di sekolah.*

Ada tiga target yang ingin dicapai MI Al Huda, yaitu target sarana prasarana pelayanan, yang ini akan berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar; target kepegawaian, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam rangka mendukung profesionalisme kerja; dan target bidang kesiswaan, yang ini akan berhubungan langsung dengan pengguna jasa pendidikan. Semakin maju dan modern sebuah organisasi, maka proses pengorganisasian atau *policy* organisasi semakin rapi, budaya organisasi semakin disiplin, dan pelayanannya pun semakin prima.

Tertib Administrasi

MI Al Huda memiliki sistem keadministrasian yang rapi dan tertib. Hal ini dapat dilihat pada ruang keadministrasian atau ruang TU. Ruang ini, ditemukan peralatan-peralatan kantor seperti: komputer, dokumen-dokumen, alat tulis menulis, dan berkas-berkas yang berhubungan dengan keadministrasian.

Pada ruang ini juga ditemukan berkas-berkas surat tersusun rapi pada lemari-lemari dan rak-rak khusus. Berkas-berkas surat masuk dan surat keluar tertata rapi sesuai dengan kode-kode surat masing-masing. Kerapian dan ketertiban keadministrasian MI Al Huda, ini salah satu indikator pendukung proses mutu atau elemen sukses madrasah. Keberhasilan administrasi sebagai salah satu indikator elemen sukses MI Al Huda.

Begitu juga bagi kepala sekolah, guru, dan staf yang akan melakukan perjalanan dinas, harus dilengkapi dengan surat tugas dari sekolah yang mengetahui kepala sekolah. Dan setiap biaya yang dikeluarkan oleh bendahara MI Al Huda akan diketahui oleh komite. Setelah biaya yang dikeluarkan oleh bendahara untuk dipergunakan, penggunaan biaya tersebut akan dimintai laporan pertanggungjawaban oleh bendahara dalam bentuk kwitansi atau lainnya. Selain data administrasi dan nota keuangan dalam bentuk kwitansi, data ini tersimpan dalam komputer khusus dan file-file yang tersusun rapi di rak-rak lemari.

Kepemimpinan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peran pemimpin sangat menentukan dalam membawa misi untuk mewujudkan visi. Visi MI Al Huda yang baik jika tidak didukung visi kepemimpinan kepala madrasah, maka madrasah tersebut tidak berjalan efektif dan efisien. Madrasah akan lumpuh karena ditinggal oleh pemilik madrasah itu sendiri yaitu masyarakat muslim. Persoalan seperti inilah yang mendorong perintis MI Al Huda melakukan restrukturisasi kepemimpinan untuk merubaha wajah MI Al Huda.

Kinerja dan produktifitas tinggi yang ditunjukkan warga MI Al Huda, yang kemudian pada tahun 2000-an membawa MI Al Huda kearah perubahan yang bermakna. Pada tahun ini, MI Al Huda berhasil menarik perhatian masyarakat Pacitan secara luas, khususnya masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pendidikan Islam. Hal ini dibuktikan oleh MI Al Huda melalui prestasi akademik dan non akademik.

Model kepemimpinan seperti apakah yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara luas terhadap MI Al Huda. Dan bagaimana MI Al Huda dapat merubah dari partisipasi pesimistis menjadi partisipasi optimistis? Apa langkah-langkah yang ditempuh dalam merubah MI Al Huda menjadi sekolah unggul berpartisipasi tinggi?

Salah satu motivasi yang mendorong kepemimpinan merubah citra madrasah dari partisipasi rendah ke partisipasi tinggi adalah semangat spiritualitas. Semangat spiritualitas ini, kemudian membangkitkan untuk melakukan perubahan. Ruhul jihad ini menjadi alat dan strategi untuk menggerakkan elemen-elemen lain di MI Al Huda, seperti guru, komite, orang tua siswa dan masyarakat luas (*stakeholders*).

Di samping faktor internal (dari dalam sekolah) sebagai pendorong partisipasi masyarakat terhadap sekolah, faktor eksternal juga memiliki peran yang menentukan untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap sekolah.

Faktor-faktor atau elemen-elemen tersebut adalah

- (1) Pemerintah sebagai sistem penentu kebijakan;
- (2) Masyarakat luas dan atau orang tua siswa; dan

(3) Sistem budaya masyarakat setempat.

Pemerintah Sebagai Sistem Penentu Kebijakan. Pemerintah sebagai regulator pendidikan, memainkan peran strategis dalam mendorong iklim kondusif pengelolaan sekolah untuk mendapatkan partisipasi masyarakat. Domain pemerintah dalam aspek ini adalah pada wilayah kebijakan dan politik pendidikan. Iklim politik yang sehat, kuat, dan baik dibangun pemerintah akan mempengaruhi dinamika pertumbuhan dan perkembangan sekolah sesuai yang diinginkan, begitu juga sebaliknya. Pengalaman sejarah panjang dinamika pendidikan Islam (madrasah) mulai dari Nabi Adam as, Ibrahim as, Musa as, Muhammad saw., sahabat, dinasti Bani Umayyah dan Banu Abbasiyah hingga ke Indonesia dari era penjajahan Belanda, Jepang. Dan pada era kemerdekaan ditandai dengan era orde, orde baru dan orde reformasi, kebijakan politik memainkan peran dominan terhadap kemajuan pendidikan, terutama madrasah.

Ada empat unsur pembentuk sistem pendidikan nasional, yaitu: *pertama*, pemerintah sebagai penentu kebijakan; *kedua*, sistem pendidikan sebagai subjek kebijakan; *ketiga*, komite sekolah/madrasah sebagai pelaksana kebijakan; dan *keempat*, satuan pendidikan sebagai sasaran kebijakan.

Keempat unsur pembentuk sistem ini memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi terhadap peningkatan mutu pendidikan MI Al Huda. Pemerintah sebagai otoritas penentu kebijakan pendidikan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perundangan yang tertuang dalam suatu rumusan konsep yang disebut dengan sistem pendidikan nasional, konsep ini kemudian dilaksanakan oleh MI

Al Huda yang dibantu oleh mitra kerja KS/M sebagai pilar MBS untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Masyarakat dan Orang Tua Siswa

Implikasi dari pemerintahan otonomi adalah penerapan konsep MBS. Konsep MBS menghendaki kemandirian sekolah di dalam mengelola dan mengurus sekolahnya secara swadana dan swadaya. Sehingga konsep ini menghendaki partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Karena konsep MBS menghendaki adanya partisipasi masyarakat luas, maka konsep ini secara tidak langsung akan memberikan harapan baru bagi pendidikan nasional, terutama madrasah. Selama Orde Baru, kebijakan pendidikan bersifat *sentralistik* atau *top down*, maka pada masa reformasi, kebijakan pendidikan bersifat *desentralistik* atau *bottom up*.

Salah satu prinsip penerapan konsep MBS adalah kemandirian sekolah di dalam mengelola sekolah dengan didukung penuh oleh masyarakat. Dan masyarakat kemudian merasakan bahwa sekolah tersebut adalah milik mereka bersama. Dan wujud dari rasa kepemilikan mereka terhadap sekolah tersebut dapat ditandai dengan loyalitas mereka terhadap sekolah, sumbangsi pemikiran, tenaga, dan materi terhadap sekolah, serta seluruh anak-anak mereka di sekolahkan pada sekolah tersebut. Baik masyarakat luas maupun masyarakat yang secara khusus menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.

Tanpa dukungan partisipasi ini, konsep MBS tidak akan pernah berjalan. Untuk itu, partisipasi masyarakat yang dianggap paling strategis adalah orang tua siswa. Untuk itu, MI Al Huda berupaya semaksimal mungkin meningkatkan mutu

pendidikannya, agar bisa menyerap masyarakat yang sadar dan peduli terhadap dunia pendidikan. Berbagai upaya pun telah dilakukan. Dan hasilnya cukup mengembirakan. Komite dan MI Al Huda, dinilai telah berhasil dan mampu mendorong masyarakat yang memiliki kecukupan ekonomi untuk menyekolahkan anaknya di madrasah ini.

Karena aspek orang tua siswa ini yang minim secara ekonomi ini, memiliki peran besar dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Kelompok masyarakat yang memiliki partisipasi terhadap sekolah yang terbesar adalah masyarakat swasta, petani dan Nelayan. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi biasa. Kelompok masyarakat model ini menaruh harapan besar pada MI Al Huda untuk mendidik putra-putrinya. Mereka secara totalitas menyerahkan dan percaya pada sekolah untuk membentuk putra-putri mereka dengan memikirkan bagaimana ikut berpartisipasi secara besar untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sistem Budaya Masyarakat Setempat

Jumlah masyarakat muslim di kabupaten Pacitan mayoritas penduduk 96,23%, dan juga dijuluki kota 1001 Goa, latar kehidupan masyarakat religius dan terpelajar. Masyarakat religius sekaligus kota pendidikan yang melekat dalam diri dan kepribadian masyarakatnya. Dua identitas ini kemudian yang akan menjadi model, corak dan warna dalam membentuk budaya, kultur, mental dan sikap masyarakatnya. Tipologi masyarakat seperti ini akan mempengaruhi partisipasinya terhadap sekolah. Tidak serta merta masyarakat begitu saja

berpartisipasi terhadap sekolah, tapi ada proses, latar, dan lingkungan yang mempengaruhi.

Inilah target-target atau agenda besar yang ingin dicapai oleh MI Al Huda, dengan harapan besar atau motivasi kuat untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat luas. Karena tanpa kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dalam pengembangan dan pengelolaan, MI Al Huda tidak akan pernah besar dan pada gilirannya sulit mendapatkan partisipasi masyarakat luas.

B. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan Instrumen tes Implementasi MBS dan peningkatan mutu pendidikan. Angket disebarkan kepada 23 orang guru dan Pengurus Komite MI Al Huda Kel Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Untuk dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai identitas guru dan Pengurus Komite di MI Al Huda, berikut disajikan secara umum identitas para responden di maksud, ditinjau dari berbagai aspek.

1. Jenis Kelamin

Jumlah guru dan Pengurus komite di M I Al Huda Kel Ploso diantaranya laki-laki 57.5% (23 orang), dan perempuan 42,5% (17 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik dibawah ini.



Gambar 4.1. Perbedaan jumlah jenis kelamin

2. Latar Belakang Pendidikan

Dari hasil Penelitian diperoleh data pendidikan terakhir guru dan pengurus komite di MI Al Huda sebanyak 5% (2 orang) lulusan SMA, 12,5% (5 orang) lulusan Diploma tiga (D 3), 82,5% (33 orang) lulusan Strata satu (S1/S2). Data selengkapnya pada grafik berikut:



Gambar 4.2 Tingkat kelulusan guru di MI Al Huda

1. Implementasi MBS

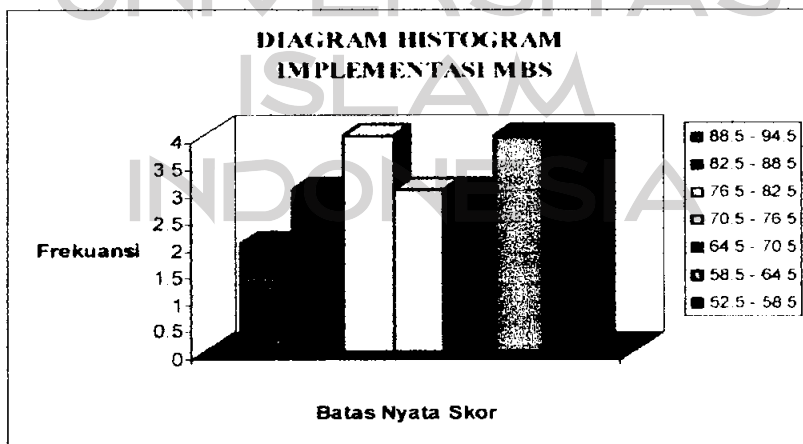
Dari hasil penelitian, diperoleh skor data Implementasi MBS di MI Al Huda dengan jumlah sampel 20 guru dan pengurus komite diperoleh nilai dengan

rentang antara 53 -101, nilai rata-rata sebesar 71,4, nilai median sebesar 71, nilai modus sebesar 62,5 dan standar Deviasi sebesar 11,8030. Tes tersebut meliputi: Manajemen. Kurikulum, manajemen. Keuangan dan pembiayaan, manajemen. Tenaga kependidikan, manajemen. Humas, dan manajemen. Sarana dan prasarana. Susunan daftar distribusi frekwensinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Distribusi Frekwensi Nilai Nyata dari Tiap Interval Mengenai Implementasi MBS

| No | Interval kelas | F | Nilai Nyata |
|----|----------------|---|-------------|
| 1 | 89 – 94 | 2 | 88,5 – 94,5 |
| 2 | 83 – 88 | 3 | 82,5 – 88,5 |
| 3 | 77 – 82 | 4 | 76,5 – 82,5 |
| 4 | 71 – 76 | 3 | 70,5 – 76,5 |
| 5 | 65 – 70 | 3 | 64,5 – 70,5 |
| 6 | 59 – 64 | 4 | 58,5 – 64,5 |
| 7 | 53 – 58 | 4 | 52,5 – 58,5 |

Dari tabel distribusi frekwensi tersebut dapat dibuat diagram batang / histogram seperti gambar berikut:



Gambar 4.3. Diagram histogram implementasi MBS.

Selanjutnya untuk mengetahui kecenderungan Implementasi MBS, digunakan nilai rata-rata skor 31. Adapun kecenderungan tersebut dibagi dalam tiga kategori (baik, sedang, kurang), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Kategori Penilaian MBS

| Skor | Kategori | Jumlah | Prosentase |
|---------------|----------|--------|------------|
| > 83,54 | Baik | 5 | 21,7% |
| 59,94 - 83,54 | Sedang | 14 | 60,9% |
| < 59,94 | Kurang | 14 | 17,4% |

Dengan melihat tabel dan histogram, dan dengan menggunakan kategori penilaian diatas, maka kecenderungan Implementasi MBS adalah sebagai berikut: kategori baik 5 guru dan pengurus komite (21,7%), kategori sedang 14 guru dan pengurus komite (60,9%), kategori kurang 4 guru dan pengurus komite (17,4%),. Ini berarti sebagian besar Implementasi MBS di MI Al Huda dalam kategori Sedang.

2. Mutu Pendidikan

Pada pengumpulan data peningkatan mutu pendidikan, penulis menggunakan angket sehingga di peroleh skor data mengenai peningkatan mutu pendidikan di MI Al Huda dengan jumlah sampel 23 guru dan pengurus komite diperoleh nilai dengan rentang antara 63-98, nilai rata-rata sebesar 81,86, nilai median sebesar 86, nilai modus sebesar 90,1 dan standar deviasi sebesar 8,89. Angket tersebut meliputi: mutu siswa, mutu guru, mutu pembelajaran, mutu

kurikulum, mutu manajerial. Susunan daftar distribusi frekwensinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Distribusi Frekwensi Nilai Nyata dari Tiap Interval Mengenai mutu Pendidikan

| Interval | Frekwensi | Nilai Nyata |
|----------|-----------|-------------|
| 93 – 98 | 3 | 92,5 – 98,5 |
| 87 – 92 | 8 | 86,5 – 92,5 |
| 81 – 86 | 2 | 80,5 – 86,5 |
| 75 – 80 | 2 | 74,5 – 80,5 |
| 69 – 74 | 7 | 68,5 – 74,5 |
| 63 – 68 | 1 | 62,5 – 68,5 |

Dari tabel distribusi frekwensi tersebut dapat dibuat diagram batang/histogram seperti gambar berikut ini:



Gambar 4.4. Histogram Mutu Pendidikan

Selanjutnya untuk mengetahui tentang Mutu pendidikan di gunakan nilai rata-rata skor. Adapun kecenderungan tersebut dibagi dalam tiga kategori (baik, sedang, dan kurang)., dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4. Kategori Penilaian Mutu Pendidikan

| Skor | Kategori | Jumlah | % |
|----------------|----------|--------|-------|
| >90,75 | Baik | 6 | 26,09 |
| 72,97 - 90,75 | Sedang | 14 | 60,87 |
| <72,97 - 90,75 | Kurang | 3 | 13,04 |

Dengan melihat tabel dan histogram, dan dengan menggunakan kategori penilaian diatas, maka kecenderungan tentang mutu pendidikan adalah sebagai berikut: kategori baik 6 guru dan pengurus komite (26,09%), sedang 14 guru dan pengurus komite (60,87%), kurang 3 guru dan pengurus komite (13,04%). Ini berarti sebagian besar peningkatan mutu pendidikan di MI Al Huda dalam kategori sedang.

C. Analisa Data

1. Pengujian Hipotesis

Hipotesis digunakan untuk mengukur ada tidaknya kaitan antara Implementasi MBS dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Dengan demikian, penelitian dilakukan untuk membuktikan berapa besar hubungan antara Variabel X dan Variabel Y. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh di jabarkan sebagai berikut:

a. Uji Korelasi

Untuk mengetahui dengan jelas nilai koefisien korelasi antara implementasi MBS dengan peningkatan mutu pendidikan di MI Al Huda menggunakan rumus korelasi product moment dari Pearson.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh harga indeks korelasi (r) sebesar 0,678. Secara kasar atau sederhana dari hasil analisis tersebut, ternyata harga indeks korelasi antara implementasi MBS dengan peningkatan mutu pendidikan tidak bertanda negatif, berarti antara kedua variabel tersebut terdapat korelasi yang positif. Jadi hubungan antara Implementasi MBS dan peningkatan mutu pendidikan adalah positif.

Tabel 4.5. Hasil Koefisien Korelasi

| DK | Rhit | r _{tab} | | Kesimpulan Data |
|----|-------|------------------|----|--|
| | | 5% | 1% | |
| 21 | 0,678 | 0,526 | | Hubungan antara implementasi MBS dan peningkatan mutu pendidikan |

b. Uji Signifikansi

Untuk mengetahui apakah Variabel bebas (X) memiliki hubungan signifikan atau tidak dengan Variabel terikat (Y) dapat diketahui dengan menggunakan uji t signifikansi yang dilakukan pada taraf signifikansi 2,08. Dengan kriteria pengujian:

Jika $t_{hit} > t_{tab} = H_0$ diterima

Jika $t_{hit} < t_{tab} = H_0$ ditolak

Berdasarkan Perhitungan pengujian signifikansi, dapat diketahui harga t_{hit} (5,750) ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan harga t_{tab} (2,08). Berarti terdapat hubungan yang signifikan antara implementasi MBS dengan Peningkatan mutu Pendidikan. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6. Hasil Signifikansi

| DK | t_{hit} | t_{tab} | Kesimpulan Data |
|----|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | 5% | |
| | 5,750 | 2,08 | Terdapat hubungan Yang Signifikan |

c. Koefisien Determinasi

Perhitungan dilakukan guna mengetahui kontribusi Implementasi MBS (X) dengan mutu pendidikan (Y). Berdasarkan perhitungan yang terdapat pada lampiran, maka dapat diketahui kontribusi Variabel X terhadap Variabel Y sebesar $r_{xy} = 0,678$ maka $KD = 45,96\%$. Sehingga kontribusi Implementasi MBS dengan peningkatan mutu Pendidikan sebesar 45,96% dan 44,04 dipengaruhi oleh variabel lain.

d. Pengujian Hipotesis dan Interpretasi data

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh t_{hit} lebih besar dari t_{tab} ($5,750 > 2,08$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Implementasi MBS dengan mutu pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi implementasi MBS maka akan semakin tinggi pula mutu pendidikan sekolah tersebut.

e. Analisa Partisipasi

Berdasarkan tahap-tahap penelitian yang ditentukan sebelumnya tersebut, maka upaya peningkatan partisipasi pengurus komite dan masyarakat untuk mendukung program sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah di MI Al Huda Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa Partisipasi pengurus komite dan masyarakat adalah menekankan pada paradigma pendidikan dalam upaya peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan global dan nasional. Sejarah pendidikan di Indonesia telah memberikan bukti bahwa pendidikan yang berbasis masyarakat mempunyai daya tahan yang luar biasa, karena di dukung oleh masyarakat yang merasa memilikinya, MI Al Huda Kel Ploso kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan adalah sebuah bukti nyata.

Namun mengembalikan kekuatan masyarakat yang telah di abaikan begitu lama tidaklah mudah. Paradigma lama telah mengaburkan pikiran mengenai pendidikan yang selayaknya. Karena kita harus beralih ke sebuah paradigma reformasi yang baru dan mungkin gagasan pendidikan berbasis masyarakat dapat dijadikan sebuah titik masuk. Pendidikan berbasis sekolah mungkin lebih tepat di lihat dari sebuah perbaikan pendidikan yang lebih luas, yakni di dalam kerangka pendidikan berbasis masyarakat menuju sebuah masyarakat mendidik atau mengajar.

Kalau didalam sistem pemerintahan sudah mulai di rintis dengan otonomi daerah, maka sejalan dengan itu di dalam MI Al Huda di rintis : “Pendidikan yang berbasis masyarakat (PBM) yakni usaha untuk menumbuhkan pendidikan dari

bawah, agar pendidikan berakar di masyarakat, dengan inisiatif dari masyarakat di kelola masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat”.

Di dalam sedikitnya Empat hal, Partisipasi pengurus komite dan Masyarakat mutlak di perlukan di MI Al Huda Kel Ploso :

1. Wilayah yang luas dan lingkungan (sosial, budaya, dan geofisik) yang bervariasi, tidak memungkinkan adanya pendekatan pendidikan yang seragam, baik dalam tujuan khususnya maupun di dalam implementasinya.
2. Pendidikan yang bersifat kontekstual hanya dapat di ciptakan apabila situasi dan kondisi masyarakat yang sangat berbeda-beda di manfaatkan sepenuhnya sebagai unsur yang penting di dalam pengembangan pendidikan di MI Al Huda.
3. Untuk berperan sebagai kekuatan di MI Al Huda Kel Ploso untuk memberikan sumbangan sebesar-besarnya kepada masyarakat, maka Partisipasi Masyarakat di lingkungan MI Al Huda dan orang Tua Siswa bercirikan :
 - a. Pola pengembangan yang melibatkan seluruh potensi di dalam masyarakat untuk turut bertanggungjawab mengenai mutu pendidikan setempat khususnya, mutu pendidikan nasional pada umumnya.
 - b. Pola swadaya yang mengutamakan, pengelolaan sendiri pendidikan di dalam konteks masyarakat.
 - c. Penentuan prioritas program pendidikan yang khas.

- d. Penyediaan dana operasional dan infrastruktur.
 - e. Pengadaan tenaga-tenaga yang kompeten.
 - f. Pelaksanaan dan pemantauan secara menyeluruh.
 - g. Penilaian dan peningkatan efisiensi dan efektifitas.
4. Pola pendidikan dan pelaksanaan secara umum merujuk pada pedoman yang bersumber pada Undang-undang pokok pendidikan nasional, serta dari ketentuan hukum lain yang di nilai perlu untuk pengembangan pendidikan di MI Al Huda.

Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan yang tertuang pada pasal 54 ayat (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan. Ayat (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan.

Demikian pula pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana yang tertuang pada pasal 55 ayat (1) masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat ayat (2) penyelenggaraan pendidikan berbasis mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan. Ayat (3) Dana penyelenggaraan pendidikan

berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggaraan, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan / atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (4) lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan / atau pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di MI AL Huda tersebut ada tiga pokok catatan yang perlu menjadi perhatian penerapan tersebut di madrasah.

1. Kemampuan ekonomi masyarakat pendukung madrasah masih lemah.
2. Madrasah terutama madrasah swasta, di naungi oleh yayasan yang acap kali berkultur sangat kaku dan cenderung otoriter. Yayasan berlaku sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan madrasah dalam arti yang luas.
3. Para pengelola madrasah kurang memahami secara mendalam dan luas peran serta fungsi mereka.

Dari tiga hal di atas, sangat jelas bahwa mau tidak mau, keterlibatan masyarakat menjadi hal yang tidak dapat di nafikan, bahkan keterlibatan mereka menjadi sangat penting demi kemajuan madrasah. Karena partisipasi masyarakat sangat penting untuk di berdayakan pada setiap madrasah.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan di MI Al Huda Kel. Ploso telah membuktikan keberhasilan antara lain :

1. Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.
2. Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk masyarakat.
3. Mampu menyelenggarakan pendidikan secara memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.

Beberapa tahapan penelitian lebih lanjut di MI Al Huda Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dari hasil pertemuan rutin antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat di dalam dapat teridentifikasi beberapa hal, baik berupa harapan, keinginan, kebutuhan, maupun potensi-potensi bersama dan kesepakatan-kesepakatan antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung program sekolah dalam rangka MBS. Pada umumnya orang tua dan masyarakat memiliki pemahaman yang tinggi untuk memajukan dan meningkatkan program sekolah yang akan dikembangkan. Hal tersebut dapat terlihat dengan

berbagai bentuk partisipasi orang tua dan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masing, baik partisipasi material maupun non-material, sebagai berikut:

- Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan mendorong masyarakat disekitar untuk mensekolahkan anaknya di MI Al Huda hingga mengalami peningkatan yg luar biasa sejak tahun 2000
 - Terdapat donatur bagi siswa yang kurang mampu sekitar 7,5% dari jumlah siswa 233, dengan rincian sebagai berikut: 6 orang yatim, 6 orang PHK, 10 orang wiraswasta (kategori tidak menentu), 10 orang pedagang kecil.
 - Hasil belajar dari 32 siswa yang kurang mampu nampak heterogen, 10 orang dari segi akademik meningkat, 22 orang meningkat pada sisi penyaluran bakat, seperti olahraga, pesantren/agama, keterampilan, kesenian (menggambar dan menari).
- b. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam melaksanakan program sekolah dapat memberikan motivasi dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam mensukseskan program sekolah tersebut dengan baik. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan, dan

aspirasi-aspirasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah disampaikan dalam rapat Komite. Selain itu sekolah berusaha menjaga dan memelihara kondisi pembelajaran sekolah sesuai dengan tuntutan minimum. Keterlibatan orang tua dalam mendukung program sekolah tersebut dapat terlihat sebagai berikut:

- Kepedulian orang tua terhadap pembinaan dan belajar siswa meningkat dari hasil belajar siswa.
 - Bentuk bantuan moril dari orang tua murid dengan turut serta dalam pendampingan dalam kegiatan sekolah dan melakukan kontrol secara terus menerus.
- c. Membahas laporan pelaksanaan program sekolah yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan penting untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sekolah disertai analisis faktor-faktor penyebabnya. Materi pengendalian dan evaluasi yang diselenggarakan mencakup kinerja manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar mengajar, termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar siswa, disiplin dan tata tertib sekolah, pemanfaatan sumber daya dan dana sekolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di dalam masyarakat yang demokratis, sekolah seyogyanya dapat dijadikan sebagai pelopor dan pusat perkembangan bagi perubahan-perubahan masyarakat di dalam bidang-bidang kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi. Sekolah hendaknya merupakan bagian integral dari masyarakat sekitarnya dalam memberikan pelayanan atas pendidikan yang berkualitas, dan berarti pula menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendidikan pada umumnya.

Sekolah diharapkan mampu menggali dan mengelola semua jenis partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program-program sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing, baik berupa partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan maupun partisipasi sosial.

Terdapat hubungan positif antara Implementasi MBS dengan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Upaya meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat, maka diperlukan hubungan dan kerjasama yang harmonis antara sekolah dan masyarakat serta mempunyai kemampuan managerial dan tenaga yang

profesional untuk menciptakan program-program sekolah yang berkualitas.

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian serta pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang positif antara Implementasi MBS dengan mutu Pendidikan yang ditunjukkan oleh hasil perhitungan dari koefisien korelasi (r) yaitu 0,678.
2. Keberartian hubungan didapat dari uji dengan hasil t hitung (5,75), ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan harga t tabel (2,08). Artinya terdapat hubungan positif dan signifikan antara Implementasi MBS dan Peningkatan mutu Pendidikan.
3. Kontribusi Implementasi MBS dengan peningkatan mutu pendidikan ditunjukkan oleh hasil dari perhitungan koefisien determinan, dengan perolehan nilai sebesar 45,96%. Berdasarkan angka yang didapat menunjukkan bahwa Implementasi MBS sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.
4. Terdapat hubungan positif antara Implementasi MBS dengan Peningkatan Mutu Pendidikan.

B. Saran

1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

2. Penyelenggaraan pendidikan berbasis mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan.
3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggaraan, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan / atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumbe daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan / atau pemerintah daerah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro, Jarome S. 2006. Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan. Yogyakarta.
- Armstrong, Michel, *Seri Pedoman Manajemen: Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alih Bahasa: Cikmat et.al., PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1990.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernitas Menuju Milenium Baru*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Bafadal, Ibrahim. 2003. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, dari Sentralisasi menuju Desentralisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bedjo Sujanto, *Mensiasati Manajemen berbasis Sekolah di Era Krisis yang berkepanjangan*. ICW, Jakarta 2004
- Danim, Sudarwan. 2007. Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokatis*, Kencana, Jakarta 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Dirjen Dikdasmen, Jakarta, 2002.
- , *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Dirjen Dikdasmen, Jakarta, 2002.
- , *Profil Pendidikan Kota Malang 2007/2008*.
- , *MPMBS, konsep & Pelaksanaan*, depdiknas dirjen diknasmen direktorat SLTP, Jakarta 2001
- Doretea Wahyu Ariyani, *Manajemen Kualitas*, Andi Ofset, Yogyakarta 1999.
- Dzaujak Ahmad, *Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar*, Jakarta, Depdikbud 1996
- Eti Rochaeti, dkk, *sist. Informasi Manaj. Pend.* Bumi aksara: Jakarta 2005
- Fadjar, Malik , *Holistik Pemikiran Pendidikan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005.

- Faisal, Sanapiah et.all., *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajaran dari Lapangan untuk Mewujudkan Visi Direktorat Pembinaan SMP*, UM Press, Malang, 2007.
- Fatah, Nanang, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- , *Landasan Manajemen Pendidikan*, Cetakan ke Tujuh, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004.
- Fredy Rangkuti, *analisis SWOT Teknik membedah kasus bisnis berorientasi konsep perencanaan strategi untuk menghadapi abad 21*, PT Gramedia utama, Jakarta, 2002
- Ibtisam Abu Duhou, *School Based Management*, Kencana, Jakarta 2004)
- Irawan, Ade, *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta*, Cetakan Pertama, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2004.
- Koentjaraningrat, *metode-metode Penelitian masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, PT. Remaja Rosda Karya, Cetakan ke Sepuluh, Bandung, 2006.
- Nurhasan, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21, Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-Ffaktor yang Mempengaruhi mutu Pendidikan*, Jakarta, PT. Sindo, 1994.
- Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, Grasindo, Jakarta, 2003.
- Oemar hamalik, *Evaluasi kurikulum*, Remaja Rosda Karya, Bandung 1990
- Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa Depdikbud, *kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999

- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cetakan Pertama, Penerbit Paramadina, Jakarta, 1996.
- Rumtini dan Jiyono. .Manaj. Berbasis Sekolah, *Konsep dan Kemungkinannya Strategi dan Pelaksanaannya di Indonesia.*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Sallis, Edward, *Total Quality Manajemen in Education Manajemen Mutu Pendidikan*, IRCiSoD, Alih Bahasa Ahmad A. Riyadi et.al.,Jokjakarta, 2006.
- Soebagio Atmodiworo, *Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta: PT.Ardadijaya*, 2000.
- Syafaruddin, *Manajemen mutu Terpadu dalam Pendidikan*, Jakarta:Grasindo, Jakarta, 2002.
- Syafarudin Saud, Udin, *Implementasi School Based Management Sebagai Strategi Pengembangan Otonomi Sekolah*, 2001.
- Tilaar, H.A.R., *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Cetakan Pertama, Terra Indonesia, Jakarta, 1998.
- Tjiptono, Fandy, *Manajemen Jasa*, Andi Offset Yogyakarta, 1999.
- Umaedi, *Manajemen mutu berbasis Sekolah / Madrasah (MMBS/M)*, CEQM, Jakarta, 2004.
- Udin Syarifudin sa.ud ., *implementasi school based management, sebagai strategi pengembangan otonomi sekolah*, 2001
- Uwes Sanusi, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999.
- Wahyu Ariyani, Doretea, *Manajemen Kualitas*, yogyakarta: Andioffset 1999



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KOEFISIEN KORELASI VARIABEL X DAN VARIABEL Y

| NO | X | Y | XY | X ² | Y ² |
|----|------|------|--------|----------------|----------------|
| 1 | 55 | 76 | 4180 | 3025 | 5776 |
| 2 | 71 | 78 | 5538 | 5041 | 6084 |
| 3 | 74 | 69 | 5106 | 5476 | 4761 |
| 4 | 53 | 73 | 3869 | 2809 | 5329 |
| 5 | 66 | 74 | 4884 | 4356 | 5476 |
| 6 | 63 | 74 | 4662 | 3969 | 5476 |
| 7 | 66 | 74 | 4884 | 4356 | 5476 |
| 8 | 71 | 74 | 5254 | 5041 | 5476 |
| 9 | 63 | 86 | 5418 | 3969 | 7396 |
| 10 | 88 | 88 | 7744 | 7744 | 7744 |
| 11 | 58 | 63 | 3654 | 3364 | 3969 |
| 12 | 90 | 93 | 8370 | 8100 | 8649 |
| 13 | 57 | 87 | 4959 | 3249 | 7569 |
| 14 | 79 | 91 | 7189 | 6241 | 8281 |
| 15 | 80 | 88 | 7040 | 6400 | 7744 |
| 16 | 70 | 87 | 6090 | 4900 | 7569 |
| 17 | 81 | 93 | 7533 | 6561 | 8464 |
| 18 | 79 | 92 | 7268 | 6241 | 8649 |
| 19 | 94 | 93 | 8742 | 8836 | 4900 |
| 20 | 62 | 70 | 4340 | 3844 | 7744 |
| 21 | 84 | 88 | 7392 | 7056 | 7056 |
| 22 | 84 | 84 | 5040 | 3600 | 7056 |
| 23 | 86 | 88 | 7568 | 7396 | 7744 |
| | 1650 | 1883 | 136724 | 121574 | 155981 |

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Data Hasil Penelitian Variabel X

Implementasi MBS

| No | Butir Pertanyaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X ² |
|------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|------|----------------|
| Resp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 55 | 3025 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 71 | 5041 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 74 | 5476 |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 53 | 2809 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 66 | 4356 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 63 | 3969 |
| 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 66 | 4356 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 71 | 5041 |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 63 | 3969 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 88 | 7744 |
| 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 58 | 3364 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 8100 |
| 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 57 | 3249 |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 79 | 6241 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 80 | 6400 |
| 16 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 70 | 4900 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 81 | 6561 |
| 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 | 6241 |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 94 | 8836 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 62 | 3844 |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 84 | 7056 |
| 22 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 60 | 3600 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 86 | 7396 |
| | 96 | 81 | 98 | 90 | 87 | 87 | 54 | 54 | 69 | 98 | 79 | 53 | 79 | 48 | 68 | 101 | 75 | 110 | 90 | 111 | 1650 | 121574 |

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Data Hasil Penelitian Variabel Y
Mutu Pendidikan

| No | Butir Pertanyaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Y | Y2 |
|------|------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|------|--------|
| Resp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 76 | 5776 |
| 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 78 | 6084 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 89 | 4781 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 73 | 5329 |
| 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 74 | 5476 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 74 | 5476 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 74 | 5476 |
| 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 74 | 5476 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 86 | 7396 |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88 | 7744 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 63 | 3969 |
| 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 93 | 8649 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 87 | 7569 |
| 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 91 | 8281 |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 88 | 7744 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 87 | 7569 |
| 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 93 | 8649 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 92 | 8464 |
| 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 93 | 8649 |
| 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 70 | 4900 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 88 | 7744 |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 84 | 7056 |
| 22 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 88 | 7744 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 88 | 7744 |
| | 101 | 93 | 107 | 91 | 87 | 95 | 93 | 93 | 97 | 109 | 95 | 82 | 79 | 87 | 98 | 88 | 106 | 99 | 87 | 95 | 1883 | 155981 |

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Mean, Median, Modus, Standar Deviasi, Distribusi Frekwensi dan Kategori Penilaian Variabel Implementasi MBS (X)

Skor 23 guru

53, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 63, 66, 66, 70, 71,

71, 74, 79, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 90, 94

Rentang Kelas:

Kelas Interval:

$$R = 1 + \text{nilai terbesar} - \text{nilai terkecil}$$

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$= 1 + 94 - 53$$

$$= 1 + 3,3 \cdot 1,36$$

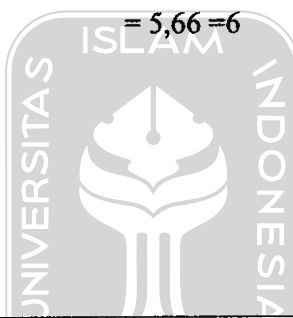
$$= 95 - 53$$

$$= 5,66 = 6$$

$$= 42$$

Panjang Kelas:

$$P = \frac{R}{K} = \frac{42}{6} = 7$$



| NO | Interval Kelas | Frekwensi | P |
|----|----------------|-----------|-------|
| 1 | 89-94 | 2 | 8,69 |
| 2 | 83-88 | 3 | 13,04 |
| 3 | 77-82 | 4 | 17,39 |
| 4 | 71-76 | 3 | 13,04 |
| 5 | 65-70 | 3 | 13,04 |
| 6 | 59-64 | 4 | 17,40 |
| 7 | 53-58 | 4 | 17,40 |

$$\text{Mean} = \frac{\sum X}{N} = \frac{1650}{23} = 71,74$$

Median = 71

$$Mo = U - \frac{(Fb)}{(Fa + Fb)} \times i = 66,50 - \frac{(4)}{(3 + 4)} \times 7$$

$$= 66,50 - \frac{28}{7} = 66,50 - 4 = 62,5$$

Standar deviasi:

$$SD = \frac{\sqrt{N(\sum X^2) - (\sum X)^2}}{N^2} = \frac{\sqrt{23(121574) - (1650)^2}}{23^2}$$

$$= \frac{\sqrt{2796202 - 2722500}}{529}$$

$$= \frac{\sqrt{73702}}{529} = \sqrt{139,32} = 11,80$$

Kategori Penilaian:

Batas Kelompok bawah sedang: Mean-SD = 71 - 11,80 = 59,2

Batas Kelompok sedang atas : Mean + SD = 5,92 + 11,80 = 71,72

Jadi dapat ditentukan tiga kategori kelompok baik, sedang dan kurang:

Kelompok baik:

Semua responden yang mempunyai skor 71,72, ke atas, yaitu skor 74, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 90, 94. Disini ada 10 orang.

Kelompok Sedang:

Semua responden yang mempunyai skor antara 59,2 dan 71,72 yaitu skor 60, 62, 63, 66, 70, 71. Disini ada 9 orang.

Kelompok Kurang:

Semua responden yang mempunyai skor 59,2 kebawah, yaitu skor 53, 55, 57, 58. Disini ada 4 orang.

Kategori Penilaian Implementasi MBS

| Skor | Kategori | Jumlah | Persentase |
|------------|----------|--------|------------|
| >71,72 | Baik | 10 | 60,9 % |
| 59,2-71,72 | Sedang | 9 | 21,7 % |
| < 59,2 | Kurang | 4 | 17,4 % |



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Mean, Median, Modus, Standar Deviasi, Distribusi Frekwensi, dan Kategori

Penilaian Variabel Peningkatan Mutu Pendidikan (Y)

Skor 23 guru

63, 69, 70, 73, 74, 74, 74, 74, 76, 78, 84, ...

86, 87, 88, 88, 88, 88, 91, 92, 92, 93, 93, 93

Rentang Kelas:

Kelas Interval:

$$R = 1 + \text{nilai terbesar} - \text{nilai terkecil}$$

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$= 1 + 93 - 63$$

$$= 1 + 3,3 \cdot 1,36$$

$$= 94 - 63 = 31$$

$$= 5,66 = 6$$

Panjang Kelas:

$$P = \frac{R}{K} = \frac{31}{6} = 5,16 = 6$$

| NO | Interval Kelas | Frekwensi | % |
|----|----------------|-----------|-------|
| 1 | 93-98 | 3 | 13,04 |
| 2 | 87-92 | 8 | 34,78 |
| 3 | 81-86 | 2 | 8,70 |
| 4 | 75-80 | 2 | 8,70 |
| 5 | 69-74 | 7 | 30,43 |
| 6 | 63-68 | 1 | 4,35 |

$$\text{Mean} = \frac{\sum Y}{N} = \frac{1883}{23} = 81,86$$

Median = 86

$$\begin{aligned} Mo &= \frac{U - (Fb)}{(Fa + Fb)} \times i = 92,50 - \frac{(2)}{(3+2)} \times 6 \\ &= 92,50 - 2,4 = 90,1 \end{aligned}$$

Standar Deviasi:

$$\begin{aligned}SD &= \frac{\sqrt{N(\sum Y^2) - (\sum Y)^2}}{N^2} = \frac{\sqrt{23(155981) - (1883)^2}}{23^2} \\ &= \frac{\sqrt{3587563 - 3545689}}{529} \\ &= \frac{\sqrt{41874}}{529} = \sqrt{79,15} = 8,89\end{aligned}$$

Kategori Penilaian:

Batas Kelompok bawah sedang = Mean - SD = 81,86 - 8,89 = 72,97

Batas Kelompok sedang atas = Mean + SD = 81,86 + 8,89 = 90,75

Jadi, dapat ditentukan tiga kategori kelompok baik, sedang dan kurang:

Kelompok baik:

Semua responden yang mempunyai skor 90,75 keatas, yaitu skor 91, 92, 93. Disini ada 6 orang.

Kelompok sedang:

Semua responden yang mempunyai skor antara 72,97 dan 90,75 yaitu skor: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90. Disini ada 14 orang.

Kelompok Kurang:

Semua responden yang mempunyai skor 72,97 kebawah 70, 69, 63. Disini ada 3 orang.

Kategori Penilaian Mutu Pendidikan

| Skor | Kategori | Jumlah | P |
|-------------|----------|--------|--------|
| > 90,75 | Baik | 6 | 26,09% |
| 72,97-90,75 | Sedang | 14 | 60,87% |
| <72,97 | Kurang | 3 | 13,04% |



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Perhitungan Uji Kolerasi Variabel X dan Y

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

$$= \frac{23.136724 - (1650)(1883)}{\sqrt{23.121574 - (1650)^2 \cdot 23.155981 - (1883)^2}}$$

$$= \frac{3144652 - 3106950}{\sqrt{2796202 - 2722500 \cdot 3587563 - 3545689}}$$

$$= \frac{37702}{\sqrt{73702.41874}}$$

$$= \frac{37702}{\sqrt{3086197548}} = \frac{37702}{55553,55} = 0,678$$



$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

$$= \frac{0,678 \cdot \sqrt{23-2}}{\sqrt{1-(0,678)^2}}$$

$$= \frac{0,678 \cdot \sqrt{21}}{\sqrt{1-0,459684}}$$

$$= \frac{0,678 \cdot 4,5825}{0,540316}$$

$$= \frac{3,106936}{0,8625} = 5,750$$

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Koefisien determinasi

$$KD = (r)^2 \times 100\%$$

$$= (0,678)^2 \times 100\%$$

$$= 45,96$$

**ANGKET PENELITIAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(Studi Kasus di MI Al Huda Kel. Ploso Kec. Pacitan Kab. Pacitan)**

A. Pengantar

Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang implementasi manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan pada MI Al Huda Pacitan.

Dalam rangka penyelesaian karya ilmiah / skripsi. Penulis sangat mengharapkan bantuan Bapak/ibu untuk menjawab pertanyaan dalam angket ini secara objektif sesuai dengan kenyataan di lapangan. Terima kasih atas respon dan partisipasi anda.

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah dengan cermat dan teliti pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
2. Berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang telah tersedia

Identitas responden

Nama :

Pendidikan terakhir :

Jenis Kelamin :

Pertanyaan

I. Variabel (X) Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

1. Apakah Bapak/Ibu membuat perencanaan program pengajaran?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
2. Apakah bapak/Ibu membuat kalender Pendidikan?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

3. Apakah Bapak/Ibu membuat penetapan pelaksanaan evaluasi belajar?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
4. Apakah dalam perencanaan anggaran, pihak sekolah melibatkan komite sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
5. Apakah pemerintah memberikan pembiayaan untuk kegiatan operasional sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
6. Apakah pengeluaran anggaran sekolah sesuai dengan rencana anggaran?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
7. Apakah Instansi Swasta / Perusahaan memberikan sumbangan kepada sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
8. Apakah dalam perekrutan guru baru di berikan tes (lisan & tulisan)?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
9. Apakah pihak sekolah mengadakan pendidikan & Pelatihan untuk para guru?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
10. Apakah pihak sekolah mengadakan rapat apabila terjadi permasalahan?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
11. Apakah kompensasi yang diberikan memberikan kepuasan ?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
12. Apakah pihak sekolah memberikan reward kepada dewan guru yang berprestasi?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

13. Apakah transparansi keuangan melibatkan komite sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
14. Apakah pihak Sekolah menerbitkan buletin sekolah yang berisi tentang informasi & kegiatan sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
15. Apakah pihak sekolah mengadakan acara open house ketika awal tahun ajaran baru?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
16. Demi kemajuan sekolah apakah dewan guru, pihak sekolah memiliki kerjasama yang intens dengan masyarakat ?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
17. Apakah Pemerintah memberikan sumbangan untuk fasilitas sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
18. Apakah pihak sekolah mengutamakan sarana & Prasarana sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
19. Apakah komite sekolah dilibatkan dalam mengadakan sarana & Prasarana?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
20. Bapak/Ibu melakukan follow up terhadap hasil belajar siswa?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

II. Variabel (Y) Peningkatan mutu Pendidikan

1. Dalam KBM apakah siswa memiliki kreatifitas yang berbeda?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

2. Apakah Bapak/Ibu merasa kesulitan dalam mengajar (menyampaikan materi pelajaran kepada siswa?)
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
3. Apakah Guru membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
4. Apakah Bapak/Ibu merasa kesulitan dalam membuat pokok bahasan?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
5. Apakah lulusan terbaik melanjutkan ke sekolah pavorit?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
6. Apakah nilai akhir (UAN) siswa/I memiliki peningkatan dari tahun ke tahun?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
7. Apakah pihak sekolah membantu guru dalam meningkatkan program pengajaran di sekolah?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
8. Materi pelajaran yang Bapak/ibu sampaikan tidak sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
9. Apakah pihak sekolah membantu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab guru dalam mengajar?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
10. Apakah pihak sekolah memberikan motivasi kepada dewan guru untuk lebih semangat dalam belajar?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

11. Apakah pihak sekolah/ guru mengikuti pelatihan / penataran KBK?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
12. Dalam menyampaikan materi, bapak/ibu tidak menggunakan media pembelajaran?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
- 13 Apakah dewan Guru memperbaiki proses belajar mengajar didalam & di luar kelas?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
14. Apakah pihak sekolah memberdayakan staff dan personel sekolah yang dapat melayani keperluan siswa?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
15. Apakah pihak sekolah melakukan kerjasama dengan dewan guru dan komite sekolah untuk melakukan perencanaan perbaikan mutu pendidikan?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
16. Apakah kepala sekolah dan dewan guru mengevaluasi program pendidikan di akhir tahun?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
17. Apakah Pihak sekolah memberikan dukungan terhadap pengembangan minat dan bakat siswa?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
18. Apakah komite Sekolah bersama dengan sekolah memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

19. Apakah Komite Sekolah melakukan kerjasama dengan kepala sekolah dan guru untuk melakukan perencanaan perbaikan mutu pendidikan?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
20. Bapak/Ibu tidak menjalankan semua aturan yang ditetapkan oleh sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**ANGKET PENELITIAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(Studi Kasus di MI Al Huda Kel. Ploso Kec. Pacitan Kab. Pacitan)**

A. Pengantar

Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang implementasi manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan pada MI Al Huda Pacitan.

Dalam rangka penyelesaian karya ilmiah / skripsi. Penulis sangat mengharapkan bantuan Bapak/ibu untuk menjawab pertanyaan dalam angket ini secara objektif sesuai dengan kenyataan di lapangan. Terima kasih atas respon dan partisipasi anda.

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah dengan cermat dan teliti pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
2. Berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang telah tersedia

Identitas responden

Nama :

Pendidikan terakhir :

Jenis Kelamin :

Pertanyaan

I. Variabel (X) Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

1. Apakah Bapak/Ibu membuat perencanaan program pengajaran?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
2. Apakah bapak/Ibu membuat kalender Pendidikan?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

3. Apakah Bapak/Ibu membuat penetapan pelaksanaan evaluasi belajar?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
4. Apakah dalam perencanaan anggaran, pihak sekolah melibatkan komite sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
5. Apakah pemerintah memberikan pembiayaan untuk kegiatan operasional sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
6. Apakah pengeluaran anggaran sekolah sesuai dengan rencana anggaran?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
7. Apakah Instansi Swasta / Perusahaan memberikan sumbangan kepada sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
8. Apakah dalam perekrutan guru baru di berikan tes (lisan & tulisan)?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
9. Apakah pihak sekolah mengadakan pendidikan & Pelatihan untuk para guru?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
10. Apakah pihak sekolah mengadakan rapat apabila terjadi permasalahan?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
11. Apakah kompensasi yang diberikan memberikan kepuasan ?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
12. Apakah pihak sekolah memberikan reward kepada dewan guru yang berprestasi?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

13. Apakah transparansi keuangan melibatkan komite sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
14. Apakah pihak Sekolah menerbitkan buletin sekolah yang berisi tentang informasi & kegiatan sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
15. Apakah pihak sekolah mengadakan acara open house ketika awal tahun ajaran baru?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
16. Demi kemajuan sekolah apakah dewan guru, pihak sekolah memiliki kerjasama yang intens dengan masyarakat ?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
17. Apakah Pemerintah memberikan sumbangan untuk fasilitas sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
18. Apakah pihak sekolah mengutamakan sarana & Prasarana sekolah?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
19. Apakah komite sekolah dilibatkan dalam mengadakan sarana & Prasarana?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
20. Bapak/Ibu melakukan follow up terhadap hasil belajar siswa?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

II. Variabel (Y) Peningkatan mutu Pendidikan

1. Dalam KBM apakah siswa memiliki kreatifitas yang berbeda?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

2. Apakah Bapak/Ibu merasa kesulitan dalam mengajar (menyampaikan materi pelajaran kepada siswa?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
3. Apakah Guru membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
4. Apakah Bapak/Ibu merasa kesulitan dalam membuat pokok bahasan?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
5. Apakah lulusan terbaik melanjutkan ke sekolah paforit?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
6. Apakah nilai akhir (UAN) siswa/I memiliki peningkatan dari tahun ke tahun?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
7. Apakah pihak sekolah membantu guru dalam meningkatkan program pengajaran di sekolah?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
8. Materi pelajaran yang Bapak/ibu sampaikan tidak sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
9. Apakah pihak sekolah membantu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab guru dalam mengajar?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
10. Apakah pihak sekolah memberikan motivasi kepada dewan guru untuk lebih semangat dalam belajar?
 - a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

11. Apakah pihak sekolah/ guru mengikuti pelatihan / penataran KBK?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
12. Dalam menyampaikan materi, bapak/ibu tidak menggunakan media pembelajaran?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
- 13 Apakah dewan Guru memperbaiki proses belajar mengajar didalam & di luar kelas?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
14. Apakah pihak sekolah memberdayakan staff dan personel sekolah yang dapat melayani keperluan siswa?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
15. Apakah pihak sekolah melakukan kerjasama dengan dewan guru dan komite sekolah untuk melakukan perencanaan perbaikan mutu pendidikan?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
16. Apakah kepala sekolah dan dewan guru mengevaluasi program pendidikan di akhir tahun?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
17. Apakah Pihak sekolah memberikan dukungan terhadap pengembangan minat dan bakat siswa?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah
18. Apakah komite Sekolah bersama dengan sekolah memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

19. Apakah Komite Sekolah melakukan kerjasama dengan kepala sekolah dan guru untuk melakukan perencanaan perbaikan mutu pendidikan?

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah

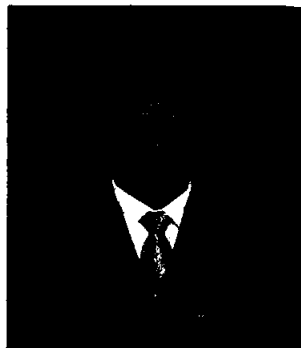
20. Bapak/Ibu tidak menjalankan semua aturan yang ditetapkan oleh sekolah?

a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. pernah e. tidak pernah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (Curriculum Vitea)



DAMHUDI, SP Lahir di Ploso Pacitan Jawa Timur, pada 03 Februari Tahun 1970. ayah dari dua anak, Herlambang Eka Persada dan Dani Alam Negara dari Istri Sulistyani.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah SD Negeri Ploso II Pacitan melanjutkan di SMP Negeri 4 Pacitan setelah menyelesaikan SMA Muhammadiyah Pacitan pada Tahun 1990 masuk Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi Universitas Muhammadiyah Malang dan selesai pada pertengahan Tahun 1995. Juga aktif di beberapa Organisasi mahasiswa antara lain senat mahasiswa dan HMI.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas direkrut oleh Yayasan Karya Mandiri Indonesia (YKMI) . Sebuah NGO Nasional yang berkembang pesat di Indonesia dan bergerak pada sector pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebelum menjadi Anggota KPU Kabupaten Pacitan, pernah mengikuti beberapa program antara lain :

1. Tahun 1997 sebagai pendamping kelompok Tani dalam Proyek Reboisasi, konservasi Tanah dan Air yang bekerja sama dengan Departemen kehutanan.
2. Tahun 1998 sebagai Konsultan Manajemen dalam Program Permerdayaan Daerah Dalam mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) di kabupaten Pacitan.
3. Tahun 1999 sebagai Konsultan Manajemen PLN bekerja sama dengan Bank Dunia dalam Program Usaha Pelayanan Pedesaan di Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro.
4. Tahun 2000 sebagai fasilitator Pendamping masyarakat dalam Program Bantuan Khusus kehutanan di Kabupaten Pacitan
5. Tahun 2001 – 2002 sebagai Fasilitator Pendamping Partisipasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dalam Program P2MPD di Kabupaten Pacitan.
6. Program Pengelolaan Lahan Kritis dan kering sebagai Fasilitator pendamping Manajemen organisasi dan Tehnis dalam Program Partisipatory Integited Development Rainfed in Areas. (PIDRA) dari IFAD.

Disamping mengelola dan melaksanakan program-program di Yayasan Karya Mandiri Indonesia pada Tahun 2001 - 2003 terlibat dan bergabung di Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan. Program yang dikembangkan adalah Pengelolaan Lahan Kritis dan kering sebagai Fasilitator pendamping Manajemen organisasi

dan Tehnis dalam Program Partisipatory Integited Development Raimfied in Areas. (PIDRA) dari IFAD.

Sejak Tahun 2003 sampai 2008 sedang menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pacitan (KPUD). Kepercayaan yang diberikan dalam KPUD adalah sebagai Berikut :

1. Ketua Divisi Pencalonan anggota DPRD kabupaten Pacitan, sebagai Ketua Divisi berusaha memenuhi Kuota 30% Calon Perempuan. Setelah Pemilihan Umum kuota tersebut terpenuhi 30% Anggota DPRD Kabupaten Pacitan adalah Perempuan..
2. Ketua Pokja Logistik dan keuangan dalam pemilu Legislatif dan Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mampu dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan meminimalisir biaya operasional.
3. Ketua Pokja Logistik dan keuangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (PILKADA).

Sejak tahun 2008 Hingga Sekarang sedang menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan. Disela-sela kesibukan sebagai Anggota KPU Kabupaten Pacitan, dipercaya oleh anak-anak Pacitan yang bergabung dalam Komunitas Peduli Anak Pacitan sebagai pendiri dan sekaligus Manajer Program Komunitas Peduli Anak Indonesia (KOPA INDONESIA).

Sebagai pengelola program berusaha membuat beberapa desain, tols program dan peraturan-peraturan lembaga untuk pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan anak baik di level Desa hingga level Nasional.

Beberapa Organisasi yang pernah diikuti :

1. Pengurus OSIS di SLTP dan SLTA
2. Pengurus Karang Taruna Desa
3. Aktif di Senat Mahasiswa, HMJ, HMI dan Organisasi Mahasiswa Lainnya.
4. Aktif di NGO Yayasan Karya Mandiri Indonesia.
5. Aktif di Lembaga pembangunan dan Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU) Kabupaten Pacitan
6. Ketua Wahana Persada Indonesia (WAPI)
7. Ketua Komite SD Ploso II Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
8. Pengurus Forum Pemberdayaan Masyarakat Pacitan (FORPAMAS)
9. Ketua Komite Play Group dan TK Mutiara Bunda Yayasan PKK Daerah Kabupaten Pacitan
10. Pendiri Komunitas Peduli Anak (KOPA) Indonesia.
11. Pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA), sebagai wakil ketua bidang Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan Perikanan.
12. Ketua RT 03 RW 01 Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, kabupaten Pacitan.
13. Pengurus GP Ansor kabupaten Pacitan, Sebagai ketua Bidang Riset dan Tehnologo.

Training dan Pelatihan yang pernah diikuti

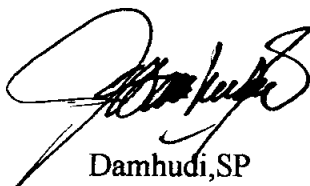
1. Kursus Komputer Terpadu
2. Pelatihan Manajemen dan Organisasi Kelembagaan.

3. Pelatihan Pengorganisasian Massa.
4. Pelatihan dan Pembekalan Tenaga Konsultan Pendamping Program Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKIE) Bapeda – Yayasan Karya Mandiri Indonesia (YKMI)
5. Pelatihan dan Pembekalan Tenaga Pendamping Masyarakat Program Pelayanan Usaha Pedesaan (PUP PLN Pusat – Yayasan Karya Mandiri Indonesia (YKMI)
6. Pelatihan dan Pembekalan Tenaga PKL dan Pendampingan Kelompok Tani RHL dalam rangka pengembangan rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS solo. Departemen Kehutanan.
7. Training of Trainers sarana Air Bersih. Yayasan Karya Mandiri Indonesia (YKMI)
8. Pelatihan Pengembangan masyarakat bagi Fasilitator Lapangan dan Petugas Tehnis Lapang. Ministry of Agriculture – PPSW – IFAD.
9. Pendidikan dan Pelatihan Training of Trainers pengelolaan mini DAS Program Partisipatory Integrated Development Rainfed In Areas. Jawa Timur.
10. Pendidikan dan Pelatihan Training of Trainers Usaha Tani Lahan Kering Program Partisipatory Integrated Development Rainfed In Areas. Jawa Timur.
11. Pendidikan dan Pelatihan Training of Trainers Pengelolaan Hasil Pertanian dan Peternakan Program Partisipatory Integrated Development Rainfed In Areas. Jawa Timur.

12. Pendidikan dan Pelatihan Training of Trainers Peternakan Ulahan Kering Program Partisipatory Integrated Development Rainfed In Areas. Jawa Timur.
13. Pelatihan Partisipatory Planning, Monitoring and Evaluation (PPME). Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Daerah (P2MPD).
14. Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Kontruksi bekerja sama dengan BPC GAPENSI Kabupaten Pacitan.
15. Pelatihan Jurnalistik dan Media komunikasi.
16. Vocacional training for Voluenterr
17. Training Kelompok Organisasi Masyarakat (CBOs, CSO dan NGO) in good Governence.
18. Pelatihan Dasar Penggalangan Dana Mitra PLAN Indonesia Area Jawa. PIRAK didukung PLAN, DFID dan CIDA.
19. Beberapa Pelatihan yang diselenggarakan oleh KPU Pusat dan KPU Provinsi.
20. Pelatihan Pengawasan dan Pemantauan Pemilu Tahun 2004.

Demikian riwayat hidupa ini dibuat dengan sebenarnya, harap dipergunakan sebagaimana mestinya, kepada yang bersangkutan harap maklum..

Pacitan 11 Januari 2011



Damhudi, SP